

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Penetapan Harga Mahar (Maskawin) Oleh Pemerintah Kerajaan Negeri Selangor, Malaysia Ditinjau Menurut Hukum Islam”**. Penelitian ini dilaksanakan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum tempat di mana penulis menimba pengetahuan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Riau, Indonesia.

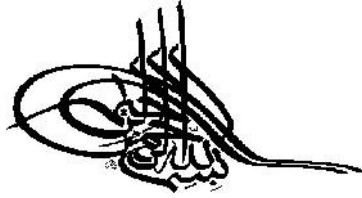
Dari penjelasan di atas, permasalahan yang diteliti adalah dari segi bagaimana penerimaan masyarakat di Negeri Selangor tentang penetapan ini dan juga wajar atau tidak untuk pemerintah menetapkan harga mahar bagi seluruh masyarakat yang berada di bawah kewenangan Jabatan Agama Islam Selangor . Di samping itu juga penulis mengkaji penetapan ini dari sudut Pemerintah melihat aturan yang terdahulu tidak lagi berjalan sesuai dengan perubahan masa serta penetapan harga mahar ini juga sebagai langkah pemerintah dalam menjamin kedudukan dan juga martabat wanita. Sungguh pun begitu dalam mengaplikasikan penetapan harga mahar ini, masih ada lagi pasangan yang akan melaksanakan pernikahan mempunyai pilihan sendiri dalam menentukan mahar mereka berbanding mengikut penetapan harga yang dibuat oleh pemerintah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dengan lebih jelas tentang siapakah yang berautoritas dalam menentukan mahar wanita baik yang berstatus dara maupun janda serta tinjauan hukum Islam terhadap mahar yang telah ditetapkan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Jabatan Agama Islam Selangor, Malaysia. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara mendalam bersama pihak terkait dan sumber data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari pelbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dengan metode pengumpulan data secara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode deskriptif yaitu digambarkan melalui kata-kata dengan teknik penulisan deduktif, induktif dan deskriptif.

Dari penelitian ini dapat ditarik satu kesimpulan bahwa dari satu sisi penetapan harga mahar ini masih lagi belum berjalan sesuai dengan syariat yang telah dilandaskan dan hal ini dapat dilihat apabila pemerintah tidak sepenuhnya mendapat persetujuan masyarakat dan juga menetapkan harga mahar kepada wanita yang bersatus janda.

KATA PENGANTAR



Dengan linangan airmata penulis memanjatkan rasa puji dan syukur kepada Allah S.W.T karena sampai saat ini penulis masih lagi bernafas dan diberikan ruang dan kesempatan untuk memperbaiki segala khilaf dan salah. Sesungguhnya setiap kesempatan dalam kehidupan adalah harga yang tidak ternilai yang patut dimanfaatkan sebaik mungkin sebelum ianya ditarik.

Shalawat serta salam senantiasa penulis ucapkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W dan keluarga serta sahabat Baginda. Moga kelak Baginda berkenan memberikan syafaat beliau kepada kita selaku umatnya diakhirat kelak, Insyallah

Sesungguhnya untuk sampai ketahap ini terlalu getir dan payah rasanya untuk penulis gambarkan perjuangan yang masih jauh dan panjang ini. Melalui penelitian ilmiah yang berjudul “**PENETAPAN HARGA MAHAR (MASKAWIN) OLEH PEMERINTAH KERAJAAN NEGRI SELANGOR DITINJAU MENERUT HUKUM ISLAM** ” yang penulis hasilkan rasanya masih jauh lagi untuk mencapai tahap kesempurnaan.

Adapun, di kesempatan yang berbahagia ini, ingin sekali penulis sampaikan dedikasi dan setinggi-tinggi penghargaan kepada mereka-mereka yang banyak memberikan inspirasi dalam mewarnai kehidupan penulis hingga saat ini:

1. Ibunda, Rosiah binti Mat Derus dan Ayahanda, Shuib Bin Nordin tercinta yang telah bersusah payah melahirkan, membesarkan, berkorban harta dan wang ringgit serta mendidik anakanda mu ini dengan penuh sabar dan kasih sayang. Sesungguhnya tiada apa yang anakanda bisa berikan sebagai galang ganti melainkan melihat anakanda mu ini tersenyum dengan kejayaan yang semakin hampir dan pasti dengan izin Allah S.W.T Insyallah. Tidak lupa juga kepada adinda Muhammad Izzad Amir, Muhammad Iqbal, Muhammad Iqmal, Muhammad Naka'ie (Arwah), Nur Ain dan Nur Fatihah serta sanak saudara kaum kerabat yang banyak memberikan sokongan untuk penulis menyelesaikan penelitian ini.
2. Yang Terhormat, Rektor UIN Suska Riau, Prof Dr H.M Nazir beserta Pembantu Rektor I, II, III, V dan seluruh Pegawai dan staff jajaran UIN Suska Riau yang sudi telah menerima dan memberikan pelayan akademik sepanjang penulis menuntut ilmu disini.
3. Yang Terhormat, Dekan Fakultas Syariah & Ilmu Hukum **Dr Akhbarizan Ma, M.Pd** beserta Team Pembantu Dekan I, (**Dr Hertina M.Pd**) Pembantu Dekan II, (**Mohd. Kastulani, SH., MH**), Pembantu Dekan III, (**Drs Ahmad Darbi B, MA**) dan seluruh Pegawai dan staf jajaran Fakultas Syariah & Ilmu Hukum yang secara

khususnya sudi menerima dan memberikan pelayanan akademik sepanjang penulis menuntut di sini.

4. Yang Terhormat, Ketua Jurusan Ahwal Syakshiah beserta Sekretaris yaitu **Drs. Yusran Sabili, MA, Dra. Yusliati Hamid, MA** dan **Drs. Zainal Arifin MA** yang telah banyak memberikan tunjuk ajar selama penulis menuntut di Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah
5. Yang Terhormat, Seluruh Dosen dilingkungan Fakultas Syariah & Ilmu Hukum yang telah memberi didikan ilmu yang amat berguna untuk penulis
6. Yang Terhormat, **M. Abdi AlMaktsur, MA** selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian ilmiah ini.
7. Yang Terhormat, Konsul Malaysia Pekanbaru, Encik Zamani Ismail beserta istri dan keluarga, Pegawai-Pegawai Home Based Staff, karyawan, karyawan dan seluruh keluarga besar Konsulat Malaysia Pekanbaru yang senantiasa memberikan motivasi dan juga semangat kepada penulis dan teman-teman sepanjang menuntut ilmu di Pekanbaru ini. Tidak lupa juga kepada Education Malaysia Indonesia, (Jabatan Penuntut Malaysia), Kedutaan Besar Malaysia, Jakarta yang peka akan kehadiran penulis dan teman-teman sebagai Mahasiswa Pengajian Islam di Pekanbaru ini
8. Yang teristimewa, guru-guru Sekolah Rendah Kebangsaan Klang Gate, Ma'ahad Tahfiz Darul Furqan, Madiwa beserta seluruh teman-teman di

Malaysia dan Indonesia yang telah banyak berjasa dalam mewarnai kehidupan penulis hingga kesaat ini.

9. Tidak penulis lupakan, Insan istimewa (Nurul Shamiza Syamsuddin) yang sedikit sebanyak memberikan semangat untuk penulis menyelesaikan hingga tuntas penelitian ilmiah ini.
10. Terakhir, dengan terhasilnya penelitian ilmiah yang masih lagi jauh dari kesempurnaan ini diharapkan sedikit sebanyak dapat membantu dalam menyelesaikan segelintir khilaf yang berlaku. Penulis amat mengharapkan segala kritikan dan masukan yang membina demi menghasilkan sebuah karya penelitian ilmiah yang lebih sempurna.

Pekanbaru, 29 September 2011

Penulis,

MUHAMAD IZWAN BIN SHUIB
NIM:10821004758

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan masalah.....	8
C. Perumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II : GAMBARAN UMUM JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR

A. Sejarah Jabatan Agama Islam Selangor.....	15
B. Perkembangan Jabatan Agama Islam Selangor penubuhan	19
C. Struktur Organisasi Jabatan Agama Islam Selangor.....	21
D. Tugas dan Wewenang Jabatan Agama Islam Selangor.....	22

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR (MASKAWIN)

A. Pengertian Mahar	24
B. Dasar Hukum Mahar	27
C. Pembagian Mahar	29

D. Ukuran Mahar.....	30
----------------------	----

BAB IV : ANALISIS HUKUM TERHADAP PENETAPAN HARGA MAHAR

OLEH PEMRINTAH KERAJAAN NEGERI SELANGOR DITINJAU

MENURUT HUKUM ISLAM

A. Latar Belakang Penetapan Harga Mahar Di Selangor.....	37
B. Respon Masyarakat Terhadap Penetapan Harga Mahar Di Negeri Selangor.....	51
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Mahar Di Negeri Selangor	49

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

M. Abdi Almaktsur, MA

Pembimbing Skripsi Muhamad Izwan Bin Shuib

Nomor : Nota Dinas

Pekanbaru, 17 Oktober 2011

Hal : Pengajuan Skripsi

Muhamad Izwan Bin Shuib

Kpd Yth :

Dekan Fakultas Syariah & Ilmu Hukum,

UIN Suska Riau

Assalamualaikum wr,wb

Dengan Hormat;

Setelah membaca, meneliti dan memberikan bimbingan serta arahan yang secukupnya dan mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara Muhamad Izwan Bin Shuib yang berjudul “**PENETAPAN HARGA MAHAR (MAS KAWIN) OLEH PEMERINTAH KERAJAAN NEGERI SELANGOR, MALAYSIA, DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**” dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) pada Fakultas Syariah & Ilmu Hukum, jurusan Ahwal-al Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan saya semoga dalam waktu terdekat ini saudara Muhamad Izwan Bin Shuib dapat dipanggil untuk menghadapi ujian munaqasyah.

Demikian harapan saya, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat hendaknya, atas perhatian yang diberikan diucapkan terimakasih, *Wassalam*

Pembimbing

M. Abdi Almaktsur, MA
NIP: 19720701 199803 1003

DAFTAR TABEL

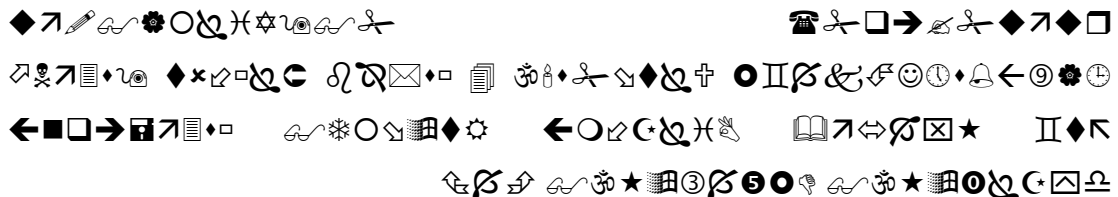
Tabel 4. 1	Pengetahuan responden tentang mahar.....	40
Tabel 4. 2	Pengetahuan responden terhadap bagian-bagian mahar	41
Tabel 4. 3	Maskawin yang ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Negeri dan juga faktor semasa ekonomi masyarakat di Selangor.....	41
Tabel 4. 4	Makawin antara hak pilihan pemberian responden dan juga harga yang ditetapkan oleh pemerintah	42
Tabel 4. 6	Maskawin yang menjadi pilihan wanita masa kini.....	44
Tabel 4. 7	Faktor tinggi rendahnya Maskawin pada masa kini dianggap bisa meninggi atau merendahkan martabat wanita.....	45
Tabel 4. 8	Mekanisme pemberian maskwin responden kepada istri.....	47
Tabel 4. 9	Kewajaran pemerintah dalam menetapkan harga maskawin.....	47
Tabel 4. 10	Bertambahnya perbelanjaan majlis perkawinan.....	49
Tabel 4.10	Kesan/dampak dari penetapan harga maskawin yang tinggi kepada responden.....	50

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam tidak menetapkan kadar serta batas yang paling maksimal dalam menentukan mahar bagi seseorang wanita. Mahar tersebut tergantung pada keadaan dan lingkungan masyarakat tertentu. Walaupun demikian, Islam menganjurkan agar kita mengambil jalan tengah yaitu tidak meletakkan mahar terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah.¹

Allah S.W.T telah pun berfirman tentang mahar (maskawin) di dalam surah an-Nisa' ayat 4 yang berbunyi:



Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang nikmat lagi baik akibatnya” QS an-Nisa’[4]²

Sedangkan didalam hadis Rasulullah S.A.W bersabda yang hadisnya berbunyi:

() ولو بخاتم من حديد

¹ Abuddin Nata, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), Cet. ke II, hal 87.

² Type Hijjaz, *Syaamil al-Quran Terjemahan al-Quran Per-Kata*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkan leema, 2007), Tanpa Cetakan, hal 77.

Artinya: “Carilah apa sahaja untuk dijadikan maskawin walaupun sebetuk cincin yang diperbuat dari besi” (Riwayat Bukhari)³

Rasulullah S.A.W juga bersabda yang berbunyi :

رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه

: ” أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا“.

وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي رواه (

Artinya: “Dari Qasim Bin Muhammad, dari Aishah R.A sesungguhnya Nabi Muhammad S.A.W bersabda: Kebanyakan perempuan yang berkat perkawinannya ialah yang mudah dan (rendah) tentang perbelanjaan”(mahar) (Riwayat Ahmad dan al-Hakim, dan Muslim menshahihkan dan Dhahabi sepakat dengan dia)⁴

Saidina Umar R.A di dalam khutbah jumaatnya menegaskan bahawa:

“Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memberikan mahar kepada kaum wanita. Rasulullah S.A.W tidak pernah memberikan mahar kepada seorang istrinya dan tidak pula menikahkan putrinya lebih dari dua bela Uqiyah”⁵

Merujuk kepada Jumhur Ulama’ yang mashur juga bersepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya. Imam Syafi’i, Ibnu Wahab, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan *tabi’in* berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada

³ Muhamad Fu’ad Abdul Baqi, *al-Lu’lu’ wal Marjan, Himpunan Hadis Shahih Yang Disepakati Oleh Bukhari dan Muslim*, penerjemah H. Salim Bahreisy, (Surabaya: Pt Bina Ilmu, 2005), Cet. ke-1, hal 484.

⁴ Imam al-Hakim, *al Mustadrak*, penerjemah Ali Murtadho, M. Iqbal Kadir, (Jakarta: Pusataka Azzam, 2010), Cet. ke V, Hal 324.

⁵ Syaikh Hassan Ayub, *Fikih Keluarga*, penerjemah M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), Cet. ke II, Hal 71.

batas terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar.⁶

Putusan penetapan maskawin mengikut sejarah bagian Undang-Undang Keluarga Jabatan Agama Islam Selangor yang mana Sultan Selangor ketika itu Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah menghendaki adanya satu kadar khas bagi maskawin sebagai garis panduan bagi masyarakat umum guna untuk merujuk segala hal yang berkaitan maskawin dan secara umumnya melalui Jabatan Agama Islam Selangor JAIS telah memutuskan melalui rapat bersama Majlis Fatwa Negeri Selangor bahwa maskawin RM 80.00 (Delapan puluh Ringgit Malaysia) bagi yang masih gadis dan janda sebanyak RM 40.00 (Empat puluh Ringgit Malaysia) mulai dilaksanakan pada 1968.

Tetapi praktik pelaksanaan terhadap putusan undang-undang ini kenyataannya di lapangan tidak memenuhi tuntutan.⁷ Pada 1 Januari 2010 lalu Pemerintah Kerajaan bagi Negeri Selangor khususnya telah mengubah pada kadar baru maskawin yang masih gadis atau janda sebanyak RM 300.00 (Tiga ratus Ringgit Malaysia) pada kadar minimum dan diselaraskan/disatukan dengan uang hantaran kepada calon laki-laki yang ingin menikahi wanita asal negeri tersebut.⁸

⁶ Muhammad Ibn 'Alwi al-Maliki al-Hasani, *Fiqih Keluarga*, (Yogyakarta: Bina Media, 2005), Cet. ke III, hal 84.

⁷ Mohd Shahizan Bin Ahmad, Penolong Pengarah Kekeluargaan/Kemasyarakatan, *Naskah Kertas Cadangan/Proposal untuk Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor*, Tanpa cetakan, hal 7.

⁸ Ahmad Baei Jaafar, *Dara Atau Janda, Mas Kahwin Minimum Rm300*, (Kuala Lumpur: Utusan Harian, 2010), Tanpa Cetakan, hal 11.

Melalui wawancara pertama bersama Ustazah Jamilah Binti Muhamad Jamil, Penolong Pengarah Bagian Undang-undang Keluarga Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS), beliau menerangkan secara umum, dasar dan upaya hukum yang dibuat untuk menetapkan kadar baru bagi mahar yang ingin disatukan dengan uang hantaran di negeri tersebut mengambil masa kurang enam bulan sebelum pelaksanaannya. Beliau juga yang mewakili Ketua Pengarah Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) Datuk Mohamed Kushrin Munawi menerangkan, cadangan itu dibuat bagi menyesuaikan semula kadar maskawin di negeri itu mengikut perkembangan semasa.

Katanya, Negeri Selangor tidak pernah mengkaji semula kadar/*tarif* maskawin yang ditetapkan hampir empat puluh tahun yang lalu. Menindaklanjuti akan hal tersebut, pihak yang terkait kemudiannya memperpanjang dengan membuat kertas kerja cadangan/proposal untuk diusulkan kepada Majlis Agama Islam Selangor dan Jawatan Kuasa Fatwa dan telah dibincangkan secara khusus melalui rapat-rapat khas yang dihadiri oleh staf bawahan, para Pegawai, Mufti dan Ulama' dan Petinggi-petinggi negeri tersebut.

Menyetujui hal tersebut Jawatan Kuasa Fatwa melalui Muftinya pada tanggal 1 November 2009 telah memutuskan bahwa kadar maskawin di Negeri Selangor bagi anak gadis dan janda adalah sebanyak RM300.00 pada kadar minimum dan tiada lagi istilah uang hantaran perkawinan tetapi uang tersebut akan menjadi "maskawin pernikahan" pasangan tersebut. Putusan ini juga telah

diperkenalkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah selaku Ketua Agama Islam di Negeri Selangor melalui usulan dari Menteri Besarnya, Tan Sri Khalid Ibrahim.⁹

Fatwa khusus tentang mahar dan umumnya tentang perkawinan pernah dikeluarkan oleh Majlis Ulama Besar Fiqih pada sidangnya yang ke 20 di Kota Tha'if¹⁰ pada tanggal 25 Syawal sampai dengan 6 Zulkaedah tahun 1402 Hijrah yang antaranya berbunyi:

"Majlis mempertegas fatwa yang dikeluarkan keputusannya nomor 52 yang khusus pada mahar ialah adapun hak-hak yang berhubung dengan kesepakatan sebagian kelompok masyarakat terhadap pemberian nilai maskawin dan tradisi tertentu, maka majlis melihat hal-hal tersebut: Persetujuan harus didasarkan pada kerelaan masing-masing kelompok masyarakat didalam membatasi nilai maskawin. Hanya saja hal tersebut, iaitu hendaklah di dalamnya tidak ada unsur paksaan dan meninggikan nilai maskawin dan apa-apa yang disepakati, harus dijalankan oleh masing-masing individu tersebut".¹¹

Dalam kitab *Fikih Lima Mazhab* juga turut di kupas tentang mahar yang ingin dirahasiakan oleh pasangan semasa akad nikah. Dalam hal ini Abu Yusuf berpendapat bahwa, yang ditetapkan adalah yang disepakati oleh keduanya secara rahasia karena mahar menggambarkan keinginan yang sebenarnya dan inilah yang dimaksud oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad nikah.¹²

⁹ Jamilah Binti Muhamad Jamil, Pegawai Penolong Pengarah Bagian Undang-undang, Jabatan Agama Islam Negeri Selangor, (JAIS), *wawancara*, Tanggal 28 Juli 2010.

¹⁰ Tha'if adalah sebuah kota kecil yang terletak di timur Makkah, Arab Saudi, www.google.com/aristek-2004.blog.friendster.com/2010/01/di-taif-buah-buahan-seolah-tak-mengenal-musim.

¹¹ Abdullah Bin Abdurahman al-Bassam, *Bulughul Maram*, penerjemah Tahrin Suparta, M.Faisal, Adis Aidizar, (Jakarta: Pustaka Alzam, 2006), Cet. ke III, hal 407.

¹² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, penerjemah Masykur A.B, Afif Muhammad Idrus al-Kaff, (Jakarta: PT. Lantera Basritama, 2004), Cet. ke XXI, hal 424.

Ibnu Rusyd melalui kitabnya *Bidayatul Mujtahid* berpendapat bahwa apabila istri menuntut penentuan maskawin bagi dirinya iya berpendapat bahwa istri berhak mendapatkan mahar *mitsil* (sebanding) dan tidak ada pilihan lagi bagi suami¹³.

Shari'ah The Islamic Law karangan Abdul Rahman I. Doi (Seorang Ahli dalam bidang Undang-Undang Internasional) berpendapat bahwa mahar yang ditentukan merupakan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak pada saat perkawinan atau sesudahnya adalah sebaik-baik kesepakatan antara kedua-duanya tanpa campur tangan pihak lain.¹⁴

Penulis juga turut memuatkan hadis yang dapat dipahami secara umumnya bertolak belakang dengan hukum yang dipakai oleh Pemerintah

(الأيم أحق بنفسها من زوجها)

Artinya: “*Dari Ibnu Abbas Rasulullah S.A.W berkata wanita janda itu lebih berhak tentang dirinya daripada walinya*” (Riwayat Muslim)¹⁵

Yunus Ibnu ‘Abdul al-A`la mengatakan seandainya dari pihak janda tidak mempunyai wali *ashib* (ahli waris) yaitu sama sekali tak mempunyai wali atau wali yang bukan wali *`ashib*, maka tidak ada hak bagi seorang pun diantara mereka untuk menghalang-halangi aqad nikahnya, baik ia kawin dengan pria

¹³ Ibnu Rusyd , *Bidayatul Mujtahid/Analisa Fiqih Para Mujtahid*, penerjemah Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Cet. Ke II, hal 451.

¹⁴ Abdul Rahman I. Doi, *Shari'ah The Islamic Law/Perkahwinan dalam Syariat Islam*, penerjemah Basri Asghari/Wadi Masturi, (Jakarta: Tanpa Penerbit, 1996) , Tanpa Cetakan, hal 70.

¹⁵ M. Nashiruddin al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim/Ringkasan Shahih Muslim*, penerjemah Elly Lathifah, (Jakarta:Gema Insani, 2008), Cet. ke IV, hal 377.

sederajat atau tidak, dengan mahar *mitsil* atau kurang. Sebab dalam keadaan demikian seluruh urusan dirinya menjadi tanggungjawabnya sendiri sepenuhnya.¹⁶

Dalam melengkapi sumber data di dalam proposal penelitian ini, penulis turut berkesempatan mewawancara pendapat ulama yang masyhur di Malaysia yang juga Pemimpin bagi Partai Oposisi di Malaysia, Partai Islam SeMalaysia (PAS) Tuan Guru Dato, Nik Aziz Bin Nikmat. Beliau berpendapat bahwa penetapan kadar baru ini akan hanya menambah masalah sosial di kalangan remaja sekaligus menaikkan biaya perkawinan. Khusus dalam keluarganya, Nik Abdul Aziz berkata beliau mengamalkan langkah menyerahkan harga maskawin kepada kesepakatan pasangan dan anak-anaknya yang kini telah pun berumah tangga. “Itulah yang sebaiknya tanpa ada campur tangan pihak ketiga”.¹⁷

Penulis turut memuatkan data wawancara bersama responden Mohd Fathi Yakan Bin Zakaria, Mahasiswa pemegang Diploma Tahfiz Darul Qur'an Jakim (D3) yang juga merancang berkahwin dengan pasangannya menyatakan bahwa isu mas kahwin tidak sepatutnya dicampurtangan oleh pihak Pemerintah Kerajaan Negeri karena maskawin menurut pendapatnya adalah hak peribadi bagi pasangan

¹⁶ Aziz Salim Basyarahil, M. Fauzan Adhim, *Janda*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), Cet. ke 1, hal 142.

¹⁷ Nik Aziz Bin Nikmat, Presiden Partai Oposisi Malaysia, Partai Islam Se Malaysia (PAS), wawancara , Kuala Lumpur, pada tanggal 8 Juli 2010.

yang ingin bernikah. “Terserah mahu dibayar berapa yang disepakati oleh kedua belah pihak pasangan tersebut”.¹⁸

Setelah membuat pengamatan pada kasus yang di angkat melalui proposal ini maka penulis akan menghasilkan sebuah penelitian ilmiah berjudul **Penetapan Harga Mahar (MasKawin) Oleh Pemerintah Kerajaan Negeri Selangor, Malaysia. Ditinjau Menurut Hukum Islam.**

B. Batasan Masalah

Bedasarkan pada masalah yang telah dihuraikan pada tajuk awal yaitu latar belakang masalah yang dipaparkan iyalah terdapat dua unsur/aspek yang digabungkan antara ibadat dan adat yaitu uang hantaran dan maskawin yang disatukan. Maka penulis akan membahas tentang hukum bagi maskawin yang ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Negeri Selangor serta bagaimana perlaksanaannya dan penerimaan masyarakat di Negeri Selangor.

C. Perumusan Masalah

Bedasarkan pada batasan masalah yang dipaparkan, yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini iyalah:

1. Apa latar belakang Pemerintah menetapkan harga mahar dalam perkawinan?
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap penetapan mahar oleh Pemerintah?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang penetapan mahar oleh Pmerintah?

¹⁸ Mohd Fathi Yakan Bin Zakaria, Mahasiswa D3, Darul Quran, Jakim, *wawancara*, Selangor, pada tanggal 2 Agustus 2010.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini dijalankan atas dasar untuk mengetahui dan mendiskripsikan permasalahan berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang Pemerintah menetapkan harga mahar dalam perkawinan.
2. Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap penetapan mahar oleh Pemerintah.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang penetapan harga mahar oleh Pemerintah.

Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini iyalah:

1. Sebagai bahan pelajaran bagi mahasiswa Jurusan Akhwal al-Syakhsiyyah khususnya dan mahasiswa UIN SUSKA RIAU pada umumnya.
2. Penelitian ini akan memperluaskan wawasan intelektualitas kepada umat Islam dibidang hukum terutamanya tentang kasus tinjauan umat Islam dan Undang-Undang terhadap penetapan mahar (maskawin).
3. Penelitian ini juga diharap dapat memberikan sumbangan karya ilmuan dan juga sumbangan pemikiran bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan dan literasi pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan melaksanakan langkah-langkah berikut:

1. Lokasi penelitian

Memandangkan penelitian ini bersifat lapangan maka penulis mengambil lokasi penelitian sesuai dengan kebutuhan penelitian yaitu di Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) yang berlokasi di Shah Alam yang mana Shah Alam merupakan Ibu Kota bagi Negeri Selangor dan umumnya seluruh lokasi di Negeri Selangor yang penulis rasa bisa mengumpul sebanyak mungkin informasi, data dan maklumat untuk kegunaan penelitian ini.

2. Subjek dan objek penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat di Negeri Selangor yang tidak mnyetujui tentang penetapan harga yang dibuat oleh Pemerintah khususnya Jabatan Agama Islam dan objek penelitiannya pula ialah penetapan harga mahar (maskawin) oleh Pemerintah Kerajaan Negeri Selangor, Jabatan Agama Islam khususnya.

3. Populasi dan sampel

Populasi yang terdapat dalam penelitian ini adalah pasangan yang mendaftarkan perkahwinannya di Negeri Selangor yang jumlah anggaran *statistik* per harinya adalah minimal 5 pasangan dan maksimalnya 20 pasangan. Angka ini berubah mengikut keadaan semasa seperti musim liburan adalah

yang paling maksimal pendaftarannya per hari dan pada hari-hari kerja yang biasa pendaftaran perkawinan adalah pada tahap minimal yang jumlahnya pertahun sekitar 1500 pasangan yang mendaftarkan perkawinan mereka untuk tahun 2009.

Populasi lain dalam penelitian ini iyalah dari kalangan kaum Bapak, Ibu dan juga kaum wanita dari kalangan masyarakat umum yang tidak terjangkau jumlahnya. Populasi dari golongan ini penting untuk di muat dalam penelitian ini bagi melengkapi sepenuhnya penelitian ini. Menimbang beberapa hal seperti waktu yang terbatas dilapangan terutamanya di samping biaya maka penulis hanya berjaya mengambil sampel berjumlah 83 orang yang mana 22 dari mereka adalah yang pasangan dan selebihnya adalah laki-laki sahaja dari keseluruhan jumlah anggaran populasi yaitu 1500 pasangan yang mendaftarkan perkawinan mereka.

Untuk populasi yang tidak terjangkau pada golongan masyarakat kaum Bapak, Ibu serta wanita Penulis bataskan sampel ini berjumlah 42 orang. Maka keseluruhan sampel yang penulis ambil dari dua jenis populasi di atas adalah berjumlah 125 orang.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini data diperoleh dari dua sumber yaitu:

- a. Data Primer,¹⁹ yaitu data yang diperoleh dari Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) dan responden masyarakat yang tidak bersetuju dengan mahar yang ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS)
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung dari literatur kitab-kitab fiqh yang ada di pelbagai perpustakaan, data dari Jabatan Agama Islam Negeri Selangor (JAIS) serta informasi lain yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data ialah seperti berikut:

- a. Observasi yaitu penulis secara langsung mengamati dan membuat tinjauan dilapangan.
- b. Penulis melakukan wawancara langsung bersama Pegawai di bagian Undang- Undang Keluarga Islam Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) dan juga bersama para pihak yang terkait²⁰
- c. Penyebaran angket, penulis mendrafkan beberapa item pertanyaan lalu disebarkan kepada masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian ini. Penulis juga mengklasifikasikan item-item pertanyaan ini kepada

¹⁹ Bambang Sunggono, S.H., M.S., *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. Ke I, hal 185.

²⁰ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), Cet. ke 1, hlm 385.

responden yang bersangkutan sahaja bagi mendapatkan data yang sesuai untuk kebutuhan penelitian.

- d. Studi Dokumentasi yaitu penulis membaca literatur dan bahan-bahan ilmiah tentang penelitian, kemudian ditelaah dan dipahami data dari bahan-bahan literatur ilmiah tersebut dan diklasifikasikan sesuai kebutuhan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan ialah teknik analisis data kualitatif dengan cara mengklasifikasikan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dituangkan data mengikut urutan bagi menjadi kerangka teori penelitian.²¹

7. Teknik Penulisan

Penulis menggunakan teknik penulisan sebagai berikut:

1. Teknik deduktif, yaitu penulis mengambil kaidah-kaidah umum dan disimpulkan menjadi khusus.
2. Teknik induktif, yaitu penulis mengemukakan fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian dianalisis menjadi umum.
3. Teknik deskriptif analitif, yaitu penulis mengemukakan data-data, keterangan serta pendapat yang bertolak belakang dengan hukum yang diputuskan oleh Pemerintah dan kemudiaanya dibuat satu perbandingan antara keduanya dan diambil satu kesimpulan sesuai kebutuhan yang diperlukan dilapangan.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), Cet. Ke XIII, hlm 15.

F. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun penelitian dengan sistematika penulisan yaitu menyusun lima bab seperti berikut:

- BAB I :** Merupakan pendahuluan yang mengandung latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan beserta kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II :** Tinjauan umum mengenai lokasi penelitian di Negeri Selangor serta profil Jabatan Agama Islam Negeri Selangor (JAIS) dan keadaan geografis lokasi penelitian.
- BAB III :** Mahar (Maskawin) dalam Syariat Islam yang terdiri dari definisi, kewajiban membayar mahar dan ukuran harga yang sesuai dianjurkan oleh Hukum Islam.
- BAB IV :** Penyajian data penelitian yaitu Penetapan Harga Mahar oleh Pemerintah Kerajaan Negeri Selangor beserta respon masyarakat dan tinjauan Hukum Islam tentang penetapan harga mahar di Negeri Selangor.
- BAB V :** Kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang berkaitan beserta Daftar Pustaka.

BAB II

GAMBARAN UMUM JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR.

A. Sejarah Penubuhan Jabatan Agama Islam Selangor

Sejarah penubuhan Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) bertitik tolak daripada keperihatinan al-marhum Sultan Hisamuddin Alam Shah al-Haj terhadap nasib rakyat dalam zaman Pemerintahan Jepang dan penularan fahaman komunis yang bisa melencengkan akidah serta kepercayaan orang melayu pada masa itu.

Penubuhan Jabatan ini membantu usaha Pemerintah dalam menghalang perkembangan fahaman komunis di Tanah Melayu di samping memperbaiki akhlak dan kepercayaan orang Melayu pada masa itu. Baginda menitahkan kepada Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor supaya satu badan hal ehwal Agama Islam untuk negeri itu diwujudkan. Sedangkan dasar awal pentadbiran Jabatan Agama Islam Selangor ini sejurus penubuhannya dirujuk susunan pentadbiran Jabatan Agama Islam Johor berasaskan satu lawatan ke Jabatan Agama Islam Johor pada 1946 dan Raja Haji Nong bin Raja Hussin telah dilantik menjadi Setiausaha pertama diawal penubuhannya.

Undang-Undang Tubuh Negeri Selangor telah digubal pada tahun 1947 meliputi hal penubuhan Jabatan Hal-Ehwal Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu. Berkelanjutan daripada perkembangan ini, tertubuhlah secara rasminya Jabatan Hal-Ehwal Agama Islam (nama awal yang digunakan) pada bulan Januari 1948.

Bangunan lama Kelab Diraja Selangor dipilih sebagai pejabat pentadbiran yang pertama di awal penubuhannya dan seluruh pembiayaan pengurusan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam ini adalah bersumberkan daripada peruntukan diraja.¹

B. Perkembangan Jabatan Agama Islam Selangor Selepas Penubuhan

Dalam mentadbir urusan hal ehwal Agama Islam di Negeri Selangor sejak tertubuhnya Jabatan Hal Ehwal Islam (nama ketika itu) JAIS telah mengalami beberapa perubahan dalam pentadbirannya bersesuaian mengikut peredaran masa. Berikut adalah perubahan setelah penubuhannya:

1. Tanggal 5 Disember tahun 1952 Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1952 (No.3 Tahun 1952) diberlakukan.
2. Januari 1953 Jabatan Hal Ehwal Islam ditukar namanya kepada Jabatan Ugama Islam Selangor (JUIS)
3. Pada tahun 1973 demi memastikan kualitas Pegawai dan staf, JAIS memperkenalkan skim berGred untuk mengklasifikasikan Jawatan-Jawatan/Jabatan-Jabatan sesuai kelulusan Pegawai-pegawai dan staf-staf JAIS.
4. Pada tahun 1982 Ibu pejabat JAIS berpindah ke tingkat 2, Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah di Shah Alam.
5. Januari 1989 Enakmen Pentadbiran Perundangan Islam Selangor 1989 (No.2 tahun 1989) diberlakukan.

¹ Khoo Kay Kim, *Selangor Dulu dan Sekarang*, (Kuala Lumpur: Persatuan Muzium Malaysia, 1985), Cet. ke 1, Hlm 50.

6. Tanggal 1 September 1991 Pengasingan pentadbiran/administrasi Mahkamah Syariah Negeri Selangor dengan JAIS.
7. Tahun 1997 penubuhan Jabatan Mufti Selangor yang secara langsung mengasingkan administrasi pentadbirannya dengan JAIS.
8. Januari 2000 Sekolah Rendah Agama Integrasi (sekolah dasar) dilaksanakan.
9. 2004 JAIS dianugerahkan sertifikasi ISO Versi 2000.
10. Juni 2004 Ibu pejabat JAIS berpindah ke Bangunan Sultan Idris Shah, Shah Alam.
11. 2006 Penstrukturan semula perjawatan tetap JAIS diluluskan.

C. Misi, Visi dan Objektif Jabatan Agama Islam Selangor

“Jais Jabatan Terbaik, Berataraf Dunia, Diredhai Allah”.

*“Mentadbir dan mengurus Hal Ehwal Islam secara amanah cekap dan berkesan
selaras dengan konsep Islam Hadhari”*

Tujuan utama Jabatan Agama Islam Selangor melalui Misi, Visi dan Objektif Jabatan Agama Islam Selangor adalah:

1. Menyediakan prasarana Institusi Islam dan perkhidmatan awam sokongan yang terbaik, cekap dan berkesan.
2. Memberikan pendidikan agama asas yang kukuh kepada semua pelajar Islam di Negeri Selangor.
3. Merancang dan melaksanakan acara-acara dakwah kepada masyarakat Islam sedia ada dan yang bukan Islam.

4. Melaksana, memantau dan memberlakukan Undang-Undang Syariat Islam berpandukan Enakmen yang berkaitan.²

D. Tugas dan Wewenang Jabatan Agama Islam Selangor

Tugas dan wewenang Jabatan Agama Islam Selangor terbagi kepada bagian-bagian berikut:

1. Bagian Pengurusan JAIS berwewenang untuk memberi perkhidmatan sokongan dengan cekap dan berkesan meliputi Unit keuangan, Unit Administrasi dan Perkhidmatan, Unit Pembangunan, Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Unit Perayaan Rasmi, Unit Perhubungan Awam dan Unit Kualitas.
2. Bagian Pendidikan Hal Ehwal Islam ini sebelum merdekanya Negara Tanah Melayu (nama Negara Malaysia sebelum merdeka) fungsinya iyalah dilaksanakan melalui sekolah pondok persendirian, manakala selepas merdeka, perlaksanaannya adalah melalui sekolah agama sesi petang dan sekolah arab Majlis Agama Islam Selangor. Pada pertengahan tahun 1960-an, pendidikan tersebut diubah kepada Sekolah Agama Kerajaan Negeri. Pada masa kini, sistem pendidikan Islam telah dipertingkatkan dengan penubuhan Sekolah Menengah Agama (SMA) dan Sekolah Rendah Agama (SRA). Sekolah Menengah Agama pula telah diambil alih oleh Pemerintah Kerajaan Persekutuan sebagai sekolah bantuan penuh kerajaan. Ini menjadikan tanggungjawab JAIS hanya tertumpu kepada Sekolah Rendah Agama (SRA), Sekolah Rendah Agama Integrasi (SRAI),

² Laman Web Rasmi Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS), Di Akses dari <http://www.jais.gov.my> pada tanggal 9 April 2011.

Taman Asuhan Kanak-Kanak Islam (TAKIS) dan Kelas al-Quran dan Fardhu Ain (KAFA).

3. Bagian Undang-Undang Keluarga fokus utamanya ialah berwenang untuk menyediakan kursus kursus pembangunan kekeluargaan Islam meliputi kursus-kursus pra-perkawinan, kemahiran kekeluargaan, kemahiran keibubapaan, perkhidmatan ibu hamil, perkhidmatan runding cara, kaunseling dan pemahaman Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 1984 (Nomor. 4 Tahun 1984). Bagian ini juga melaksanakan pemantauan aduan keluarga, pengurusan data maklumat nikah, cerai dan rujuk, menyediakan perkhidmatan guaman syarie, khidmat nasihat dan pengurusan pentauliah pendaftar, timbalan pendaftar dan penolong pendaftar, nikah, cerai dan rujuk dalam Negeri Selangor.³
4. Bagian Penguatkuasaan melaksanakan tugas-tugas pemberlakuan undang-undang dan pematuhan berkesan serta berusaha untuk mencegah kemungkaran dengan penuh tanggungjawab, berhikmah, berhemah, bertoleransi dan sabar. Kewenangan Bagian Penguatkuasaan ini meliputi penerimaan aduan masyarakat, melaksanakan tindakan siasatan dan menyediakan fail kasus.⁴
5. Bagian Penyelidikan dan Pembangunan fokus utama Bagian Penyelidikan dan Pembangunan ini adalah untuk menangani penyelewengan akidah yang berpunca

³Jamilah Binti Muhamad Jamil, Pegawai Penolong Pengarah Bagian Undang-Undang Jabatan Agama Islam Negeri Selangor (JAIS), *wawancara*, Shah Alam, pada tanggal 28 Juli 2010.

⁴Fazlina Binti Yusuf, Pembantu Tadbir Bagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Selangor (JAIS), *wawancara*, Shah Alam, pada tanggal 10 November 2010.

daripada ajaran sesat, menentukan kaedah dan prosedur penyediaan makanan halal dan mengawal bahan-bahan literasi penerbitan keagamaan.

6. Bagian Pengurusan Masjid diwewangkan untuk menjadikan masjid sebagai kawasan yang aman untuk beribadah dan mengadakan acara membangun ummah. Ia juga untuk memastikan masjid-masjid dan surau-surau berada dalam keadaan baik dan selesa untuk umat Islam beribadat dan mengadakan acara-acara pengimarahannya.
7. Bagian Pengurusan Dakwah diberi kewenangan untuk menyampaikan dan meningkatkan kesadaran ajaran Islam kepada masyarakat Islam khususnya di Negeri Selangor. Antara aktiviti utama bahagian ini termasuklah pengurusan pentauliahan berceramah dan mengajar al-Quran, pengurusan hal-ehwal pemantapan kesadaran berdakwah, kuliah-kuliah, ceramah-ceramah dan perlaksanaan aktiviti-aktiviti dakwah secara bersama dengan NGO (*non government organization*)
8. Bagian Perundangan Syarak berperanan untuk menjalankan tugas-tugas pendakwaan terhadap mereka yang melakukan kesalahan di bawah Undang-Undang Islam yang berlaku di negeri Selangor dan juga mencadangkan

pindaan atau penggubalan terhadap Enakmen Undang-undang Islam Negeri Selangor⁵.

E. Struktur Organisasi Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS)

Duli Yang Maha Mulia Sultan merupakan Ketua Perlembagaan negeri bagian masing-masing. Di bawah perlembagaan negeri, kuasa perundangan dipunyai oleh Dewan Undangan yang melantik ahli Dewan untuk membentuk Majelis Musyawarah Kerajaan (Exco⁶). Exco yang diketuai oleh Menteri Besar memegang kuasa Eksekutif dan merupakan badan yang membuat dasar Kerajaan Negeri. Menteri Besar yang dilantik oleh sultan adalah daripada partai politik yang memenangkan kursi yang terbanyak dalam Dewan Undangan hasil pilihanraya umum (PEMILU). Maka Sultan bagi setiap negeri di Malaysia dilantik sebagai ketua agama bertanggungjawab terhadap pentadbiran islam. Bagi negeri-negeri yang tidak mempunyai institusi beraja seperti Melaka, Pulau Pinang, Sarawak, Wilayah Persekutuan, Sabah, Ketua Agama yang bertanggungjawab terhadap pentadbiran Agama Islam iyalah Yang Di Pertuan Agong. Kebanyakan negeri menjadikan Majelis Musyawarah Dewan Undangan Negeri sebagai institusi tertinggi (pembuat dasar) dan diikuti Majlis Agama & Adat Istiadat, Jabatan Mufti, dan Jabatan Agama Islam.⁷

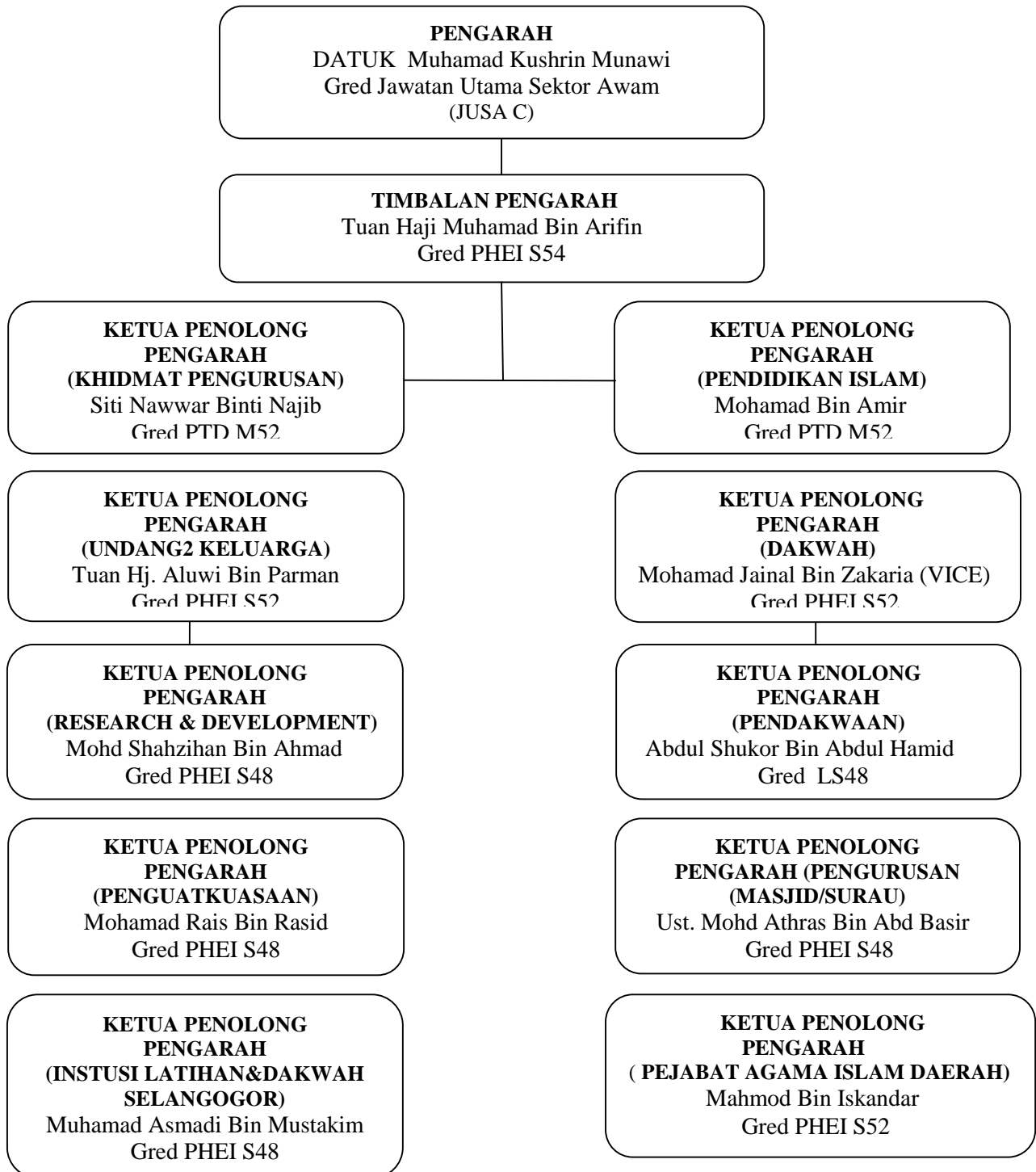
⁵ Jaafar bin Ahmad, Mohd. Khialdin bin Hj. Ahmad, *Peranan Majlis-Majlis/Jabatan-Jabatan Agama Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam Di Malaysia*, (Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 1984), Cet. Ke 1, hal 30.

⁶Ranjit Singh Malhi, *Kenegaraan Malaysia*, (Subang: Federal Publication Sdn Bhd, 1994), Cet. Ke, III, hlm 85.

⁷Sejarah, geografi, Penduduk Malaysia". Diakses pada 10 April 2010 dari http://ms.wikipedia.org/wiki/Malaysia_files/ads_002/Negeri_Selangor.

Dalam hal mentadbir dan mengurus operasi sehariannya, JAIS sebagai badan yang bernaung di bawah Negeri dan juga Kerajaan Negeri Selangor JAIS diketuai oleh Majlis Tertinggi yaitu Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sebagai ketua bagi Negeri Selangor dan ketua Agama Islam bagi negeri tersebut dan juga bertindak sebagai penasihat kepada JAIS. Kemudian di bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan terdapat kuasa Eksekutif yaitu Majlis Musyawarah EXCO yang diketuai oleh Menteri Besar sekaligus mengetuai JAIS sebagai salah satu badan yang terstruktur didalam Kerajaan Negeri Selangor. Kemudiannya barulah JAIS di tadbir oleh system hirarki seperti yang terlampir di tabel yang dibawah:

Struktur Organisasi Jabatan Agama Islam Negeri Selangor (Jais)



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR (MASKAWIN)

A. Pengertian Mahar

Sebelum penulis membahas lebih lanjut tentang definisi mahar, terlebih dahulu penulis akan mengungkapkan arti mahar dari segi bahasa dan istilah.

1. Mahar dari segi bahasa:

Mahar mempunyai tujuh nama lain yaitu *shadaq*, *nihlah*, *faridhah*, *hiba*, *ajr*, *uqr*, *ala'iq*,¹ yang kesemuanya disebut dalam al-Quraan kata mahar itu atau arabnya مهر dirujuk dalam kamus *Arab-Melayu Idris al-Marbawi* membawa arti maskawin. Arti dari *shadaq* yang berasal dari kata *shidq* berarti jujur/kesungguhan sebagai satu syarat keinginan menikah yang bersungguh-sungguh. Sedangkan lafaz *nihlah* pula dari segi bahasa ialah suatu pemberian dari suami kepada istri karena berlakunya perkawinan.²

2. Definisi mahar/maskawin menurut istilah *syara'*:

Terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama madzhab yang berbeda dari segi tulisannya tapi pada dasarnya memiliki maksud yang hampir atau seakan sama seperti:

¹ Muhammad Bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, penerjemah Muhammad Isnan, Ali Fauzan, Darwis, (Jakarta: Darus Sunnah, 2008), Cet. ke V, hlm 2008.

³⁴ Mohd Idris Abdul Rauf al-Marbawi, *Kamus Arab-Melayu Idris al-Marbawi*, (Kuala Lumpur: Darul Fikir, 1990), Cet. ke 1, hlm 283.

- a. Imam Syafi'i berpendapat bahwa suami berkewajiban memberikan mahar pada istri untuk membolehkannya menguasai seluruh anggota tubuh istrinya.
- b. Ulama madzhab Hanbali mendefinisikannya sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, dan ditentukan setelah akad nikah dengan persetujuan kedua belah pihak maupun ditentukan oleh hakim.
- c. Sebagian ulama madzhab Hanafi mendefinisikan mahar sebagai sejumlah harta yang menjadi hak istri karena akad pernikahan atau disebabkan terjadinya senggama dengan sesungguhnya.
- d. Ulama lainnya mendefinisikan sebagai harta yang wajib dibayarkan suami kepada istrinya ketika berlangsung akad nikah sebagai imbalan dari kesediaan penyerahan diri kepada suami (senggama).³
- e. Ulama' kontemporer hari ini seperti Imam Muhammad Abduh (Mufti Besar Mesir) merunkaikan istilah *nihlah* itu sebagai hubungan suami istri yang berlaku tidak hanya sekadar keperluan seksual semata-mata. Lebih jauh dari itu beliau mengartikan *nihlah* sebagai hubungan suami istri yang mencakup kasih sayang antara laki-laki dan wanita dengan pertalian ikatan yang sah dan juga sebagai tempat yang sah untuk mengembangkan zuriat dan keturunan manusia. Arti dari *nihlah* inilah yang membedakan akad nikah dan akad lainnya.

³ Syaikh al-Allamah Muhammad Bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, penerjemah Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi Press, 2010), Cet. Ke XIII, 356.

Dari definisi istilah mahar di atas, Imam Muhammad Abduh menjelaskan bahwa hikmah pemberian mahar dari suami kepada istri akan membuatkan istri merasa senang hidup dibawah pimpinan suaminya.⁴

3. Syarat-syarat mahar

Para Fuqaha' juga sepakat menentukan bahwa mahar yang diberikan pada istri harus memenuhi syara-syarat berikut:

- a. Harta benda yang berharga. Tidak sah mahar dengan sesuatu yang tiada harga, walaupun tidak ada ketentuan sedikit atau banyaknya mahar, akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka iya tetap sah.
- b. Harta benda yang suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan memberikan khamar, babi atau darah karena nilai harta-harta tersebut haram dan tidak bisa mendatangkan manfaat disisi Syariat Islam.⁵
- c. Harta bukan *ghasab* yaitu harta yang diambil dari orang lain tanpa seizinya tuannya tetapi tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikan pada tuannya kelak. Meskipun begitu, jika ada suami yang memberikan mahar dengan harta *ghasab* yang tidak sah tetapi akadnya tetap sah.⁶

⁴ Muhammad Ali Qutb, *Mutiara Perkahwinan Menurut Ajaran Islam*, (Selangor: Pustaka Haji Abdul Majid Sdn Bhd, 2010), Cet. ke II, hlm 41.

⁵ Ramayulis Khatib, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1996), Cet. Ke II, hlm 40

⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I*, penerjemah Muhammad Afifi, Abdul Hafiz (Jakarta: al-Mahira, 2008) hlm 554.

d. Harta yang tidak jelas keadaanya. Tidak sah memberikan mahar dengan harta yang belum diketahui keadaan dan kejelasannya.

B. Dasar Hukum

Terdapat banyak dalil dari al-Quran maupun hadis yang menfardhukan pemberian mahar ke atas suami kepada isteri seperti nas yang di bawah:

1. Firman Allah S.W.T tentang kewajiban suami membayar mahar kepada istri terdapat dalam surah an-Nisa' ayat 26

[illegible]

Artinya: “Kemudian mana-mana perempuan yang kamu nikmati percampuran dengannya (setelah ia menjadi isteri kamu), maka berikanlah kepada mereka maskawinnya (dengan sempurna), sebagai suatu ketetapan (yang diwajibkan oleh Allah) dan tiadalah kamu berdosa mengenai sesuatu persetujuan yang telah dicapai bersama oleh kamu (suami isteri) sesudah ditetapkan maskawin itu (tentang cara dan kadar pembayarannya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana”QS an-Nisa [26]

[illegible]

dalam arti menikmati hubungan perkawinan yang dijalin secara normal, dan karena penekanannya pada kenikmatan serta kelezatan hubungan jasmani, maka maskawin dinamai *ajr* yang secara *harfiah* berarti upah atau imbalan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberian mahar seorang suami terhadap istrinya, bukan berarti mahar menjadikan perempuan sebagai alat tukar atau barang yang bisa diperjual-belikan bahkan mahar sebagai simbol untuk memuliakan dan menghormati serta untuk mengungkapkan apa yang telah menjadi fitrah perempuan yaitu mencintai harta dan suka berhias. Jadi dengan mengeluarkan harta merupakan bukti nyata akan keseriusan suami untuk menunaikan tanggungjawab serta melaksanakan hak-hak istri. Selain bukan sebagai alat ukur terhadap wanita ayat diatas juga ialah sebagai suatu bentuk tuntutan Allah S.W.T terhadap kaum laki-laki yang bergelar suami.⁷

2. Rasulallah S.A.W juga mewajibkan para suami memberi mahar kepada istrinya dan mencela para suami yang tidak menjalankan apa yang telah disyariatkan dengan sabdanya :

أَبِي هُرَيْرَةَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ لَا يُؤَدِّيَهُ إِلَيْهَا فَهُوَ زَانٍ ، وَمَنْ أَدَّانَ دَيْنًا وَهُوَ يَنْوِي أَنْ لَا يُؤَدِّيَهُ إِلَى صَاحِبِهِ - أَحْسَبُهُ قَالَ - : فَهُوَ سَارِقٌ (البزار وغيره)

Artinya: “Barang siapa yang menikahi wanita wajib memberikan mahar, dan dia berniat tidak membayarkan maharnya kepadanya (si wanita), maka dia adalah pezina. Dan barang siapa yang berhutang dan dia tidak berniat tidak membayarkan kepada yang menghutangi

⁷ Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, penerjemah Abu Ahsan Sirojuddin Hsan Basri, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010), Cet. Ke III, hlm 470.

nya, maka dia iyalah seorang pencuri” (Riwayat Abu Hurairah dan lainnya)⁸

Hadis di atas menunjukkan bahawa betapa celaknya dosa bagi kaum-kaum laki-laki yang berstatus suami kerana tidak menunaikan kewajiban seperti yang telah diperintahkan oleh Allah S.W.T dan Rasulnya.

C. Pembagian Mahar

Para Fuqaha' juga sepakat mengatakan mahar terbagi kepada dua bagian yaitu:

1. Mahar *musamma* yaitu mahar yang telah disepakati oleh pihak suami istri dan kemudian disebutkan di dalam akad atau selepas akad dengan keridhaan keduanya.⁹ Ini berdasarkan Firman Allah di dalam surah al-Baqarah:

[illegible]

Artinya: “Dan jika kamu ceraikan mereka sebelum kamu sentuh (bercampur) dengan mereka, padahal kamu sudah menetapkan kadar maskawin untuk mereka, maka mereka berhak mendapat separuh dari

⁸ Muhammad Bin Kamal Khalid as-Suyuthi, *Kumpulan Hadis Yang Di Sepakati Empat Imam*, penerjemah Masruni Sasaky, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet. Ke II, hlm 253.

⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), Cet. Ke III, hlm 98.

*maskawin yang telah kamu tetapkan itu, kecuali jika mereka memaafkannya tidak menuntutnya” QS al-Baqarah.[237]*¹⁰

2. Mahar *mitsil* yaitu mahar sebanding. Dalam menentukan mahar ini berlaku perbedaan pendapat antara para Ulama’ mazhab Hanafi mengemukakan bahwa mahar tersebut adalah sejumlah mahar yang sama nilainya dengan mahar yang diterima oleh perempuan yang menikah dari pihak ayahnya (seperti adik/kakak perempuan dan kemanakan perempuan ayah). Ulama’ madzhab Hambali menyatakan bahwa mahar *mitsil* itu adalah sejumlah mahar yang berlaku bagi keluarga wanita tersebut dari pihak ayah dan ibu (seperti adik/kakak perempuan ayah/ibu) ulama madzhab Maliki dan Syafi’i menyatakan bahwa mahar *mitsil* itu dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku dalam keluarga tersebut ketika melangsungkan perkawinan seorang wanita.¹¹

3. Hampir mayoritas Fuqaha’ mendefinisikan bahwa bagian mahar itu hanya terbagi kepada musamma dan *mitsil* tetapi penulis juga ingin memasukkan bagian mahar yang menjadi pendapat Abu Yusuf yaitu mahar yang dirahasiakan atau pun mahar *sir* (nama yang diberi oleh mazhab Ahmad)¹² dimaksudkan mahar yang tidak diucapkan pada akad nikah, namun telah disepakati jumlahnya sebelum akad nikah dilangsungkan.

D. Ukuran Mahar

¹⁰ Yayasan Penyelenggaraan penterjemahan al-Quran, *al-Quran Dan Terjemahannya*, (Semarang: Cv Toha Putra, 1989), Cet. Ke III, hlm 58.

¹¹ Abuddin Nata, *Fiqh Munakahat, op. cit*, hlm 89.

¹² *Ibid*, hlm 337.

Syariat Islam tidak pernah menentukan batas minimal atau maksimal mahar disebabkan setiap individu berbeda kemampuan materialnya. Meskipun begitu terdapat banyak dalil petunjuk untuk mengukur pemberian mahar seperti yang sesuai dengan anjuran Syariat Islam. Berikut adalah dalil-dalil tentang ukuran mahar:

1. Firman Allah S.W.T tentang ukuran mahar telah diberitahu melalui surah an-Nisa' ayat 25



Artinya: “Dan sesiapa di antara kamu yang tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk berkawin dengan perempuan - perempuan yang baik-baik (yang merdeka, yang terpelihara kehormatannya) lagi beriman, maka bolehlah kamu berkawin dengan hamba-hamba perempuan yang beriman yang kamu miliki. Dan Allah lebih mengetahui akan iman kamu masing-masing (suami yang merdeka dan isteri dari hamba - abdi itu) adalah berasal sama (dari Adam, dan seagama pula). Oleh itu berkawinlah dengan mereka

*dengan izin walinya serta berikanlah maskawinnya menurut yang patut mereka (hamba – hamba perempuan yang akan dijadikan isteri) hendaklah yang sopan bukan perempuan-perempuan lacur, dan bukan pula yang mengambil lelaki sebagai teman simpanan. kemudian setelah mereka (hamba-hamba perempuan itu) berkawin, lalu mereka melakukan perbuatan keji (zina), maka mereka dikenakan separuh dari (hukuman) seksa yang ditetapkan ke atas perempuan-perempuan yang merdeka.(hukum perkawinan).Yang demikian (yang membolehkan seseorang berkawin dengan hamba-hamba perempuan) itu ialah bagi orang-orang yang bimbang melakukan zina di antara kamu dan sabarnya kamu(tidak berkawin dengan hamba-hamba perempuan) itu adalah lebih baik bagi kamu dan (ingatlah) Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani”
QS an-Nisa [25]¹³*

Segi pembuktian dalil di atas secara normatif bahwa Allah S.W.T ketika menghalalkan untuk menikahi budak-budak wanita mensyaratkan tidak cukup *thaul* di sini dapat diketahui bahwa tidak semua orang memiliki pembelanjaan, dan telah diketahui bahwa pembelanjaan dalam ayat ini adalah harta, dan sesuatu tidak dinamakan harta bila nilai sesuatu itu kurang dari tiga dirham, maka faraj (kemaluan) belum dihalalkan dengan mahar yang kurang nilainya dari tiga dirham.

2. Hadis yang diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dari Jabir ra.bahwa ia berkata:

عليه

ﷺ

(_____)

Artinya: “*Dari Jabir bin abdillah berkata: Pada zaman Rasulullah saw kami menikah dengan (mahar) berupa segenggam makanan*”¹⁴

¹³ Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran, *al-Mujib al-Quran Dan Terjemahannya Edisi Asmaul Husna Dan Doa*, (Bandung: al-Mizan Publishing House, 2009), Cet. ke II, hlm 83.

¹⁴ Imam al-Hafidz Ali bin Umar Abu ad-Daraquthni, [*Sunan Ad-Daruquthni Jilid 3*](#), penerjemah Majdi Bin Manshur, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), Cet. ke III, hlm 243.

Dan hadis dari Sahl bin Sa'ad pula yakni:

عن سهل بن سعد أن امرأة عرضت نفسها على النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال له رجل: يا رسول الله زوجنيها فقال: ما عندك؟ قال: ما عندي شيء. قال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع، فقال: لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزار ي ولها نصفه قال سهل وما له رداء. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لبستته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبستته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى إذا طال سه قام فرآه النبي -صلى الله عليه وسلم- فدعاه أو دعي له فقال له: ماذا معك من القرآن؟ فقال معي سورة كذا وسورة كذا لسور يعندها، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- أملكناكها بما () .

Artinya; “Dari Sahl bin Sa’ad bahwasanya seorang wanita menyerahkan dirinya kepada Nabi saw kemudian tampil seorang laki - laki dan berkata, ya Rasulullah, kawinkanlah saya dengan wanita ini. Maka Rasulullah bersabda apa yang ada disisimu? laki-laki tersebut menjawab:” saya tidak memiliki sesuatu” Rasulullah bersabda: pergilah mencari sekalipun sebetuk cincin yang terbuat dari besi. Maka laki-laki tersebut pergi kemudian kembali, dan berkata: “demi Allah saya tidak mendapatkan sesuatu, dan tidak memiliki cincin besi, akan tetapi inilah sarung saya dan baginya separuh. Sahal berkata: maka tidak ada baginya yang dikembalikan. Maka berkata Rasulullah saw: Apa yang bisa dilakukan dengan sarungmu, jika kau memakainya maka dia tidak dapat apa-apa dan jika memakainya maka kau pun tidak memakai apa-apa. Maka laki-laki itupun duduk dalam waktu yang lama dan ketika dia berdiri Rasulullah saw melihatnya dan memanggilnya. Maka Rasulullah saw berkata kepadanya, “Apa yang ada padamu dari (hafalan) alquran?” Dia menjawab: Saya menghafal surah begini dan surah begini hingga beberapa surah. Maka Nabi saw berkata, Saya menjadikannya milikmu (menikahkanmu) dengan hafalan al-Quran yang ada padamu” (Riwayat Bukhari)¹⁵

Sahl bin Sa'ad sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas berpendapat bahwa mahar akan menjadi sah dengan apa sahaja yang disebut sesuatu walaupun berupa sebiji gandum.

¹⁵ Ibid, hlm 485.

Sesungguhnya mahar juga sah dengan sesuatu yang memiliki nilai baik berupa nilai materi atau in materi seperti hadis dibawah ini:

عن أنس بن مالك قال: خطب أبو طلحة أم سليم، فقالت: يا أبا طلحة ما مثلك يُرد امرأة مسلمة لا يحل لي أن أتزوجك فإن تسلم فذلك مهري لا أسألك غيره، فأسلم فكان ذلك مهرها، قال ثابت: فما سمعت بامرأة كانت أكرم مهرا من أم سليم ()

Artinya: “Dari Anas berkata: Abu Thalhah melamar Ummu Sulaim tetapi ditolak maka dia berkata: Demi Allah, tidak ada (lelaki) yang sama sepertimu, hai Abu Thalhah, Akan tetapi, kau adalah seorang yang kafir sedangkan saya ini seorang wanita muslimah, dan tidak halal bagiku untuk menikah denganmu. Jika kau muslim (masuk Islam), maka itu adalah maharku, dan saya tidak akan meminta kepadamu selain hal itu. Maka dia pun (Abu Thalhah) masuk Islam dan itu adalah maharnya” (RiwayatNasa’i)¹⁶

Nilai in matril yang terdapat di dalam hadis ini ialah dengan menikahnya Ummu Sulaim bersama Abu Talhah yang mana maskawin Ummu Sulaim ialah dengan Abu Talhah memeluk Islam dan Ummu Sulaim redha dengan maskawin tersebut.

3. Imam Syafi’i berpendapat bahwa segala sesuatu yang dapat diperjual belikan atau disewakan dengan harga tertentu boleh dijadikan sebagai mahar, sedangkan yang tidak boleh dijual atau disewakan maka tidak dapat dijadikan mahar. Tidak dapat dijadikan mahar kecuali sesuatu yang diketahui ukurannya. Boleh pula dijadikan mahar suatu benda yang dapat dijual tunai atau tidak, sama saja apakah jumlahnya sedikit atau banyak. Diperbolehkan menikahi wanita dengan mahar beberapa dirham atau kurang dari satu dirham atau sesuatu yang nilainya kurang dari satu dirham maupun sesuatu yang harganya sangat sedikit, apabila wanita

¹⁶ M. Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Nasai*, penerjemah Abu Zahwa, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), Cet. Ke 4, hlm 515.

yang akan dinikahi ridha dan ia termasuk wanita yang berkuasa penuh terhadap hartanya.¹⁷

4. Imam Malik berpendapat bahwa ukuran batas minimal mahar adalah tiga dirham atau satu per empat dinar, atau senilai kadar itu dari benda selain emas dan perak atau dari suatu yang suci dan tidak mengandung najis, bermanfaat, berfaidah secara *syar'i* baik berupa modal, gandum atau lahan, tidak berupa suatu alat untuk permainan yang sia-sia dan benda tersebut mampu untuk diberikan kepada istri serta diketahui ukuran, bentuk dan juga sifat dari benda tersebut.
5. Imam Hanafi pula berpendapat bahwa ukuran minimal mahar tersebut iyalah sebanyak harta yang dicuri oleh pencuri yang dengan perbuatannya itu tangannya dipotong, yaitu sepuluh dirham atau satu dinar.¹⁸

Dengan pelbagai dalil tentang ukuran mahar di atas, secara tepatnya Syariat Islam tidak menetapkan secara khusus tentang ukuran pemberian mahar kepada istri melainkan dengan dalil-dalil di atas sebagai petunjuk bahwa Syariat Islam justru menganjurkan umatnya memurahkan mahar untuk memberkati dan mempermudah pernikahan antara laki-laki dan wanita.

Secara keseluruhan dari dalil al-Quran, Hadis, definisi bahasa dan juga istilah yang dikemukakan oleh para ulama' tentang pengertian mahar di atas dapat difahami betapa pentingnya fungsi dari mahar itu walaupun rendah nilai mahar

¹⁷ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, penerjemah Imron Rosadi, Amiruddin, Imam Awaluddin, *op cit*, hlm 487.

¹⁸ Syaikh allamah Muhammad Bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, *op. cit*, hlm 358.

tersebut iyalah sebagai suatu ketetapan dari si suami kepada istri yang telah ditentukan oleh Syariat Islam. Iya juga adalah harta mutlak milik istri yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapa pun termasuk orang tuanya melainkan jika ia memberikan dengan senang hati.

Tetapi apa yang berlaku pada masyarakat hari ini adalah sangat jarang ditemukan dengan mempraktikan tuntutan Syariat Islam malahan yang berlaku hari ini adalah dengan mempermahal dan berlomba dalam menaikkan harga mahar tersebut tetapi banyak yang tidak mengetahui fungsi mahar itu. Masyarakat juga hari ini berpendapat bahwa dengan menaikkan harga mahar tersebut mereka dapat mengangkat martabat wanita masa kini sedangkan perkara menaikkan harga mahar tersebut bukanlah tujuan pokok dari perkawinan melainkan hanyalah antara suatu tuntutan yang wajib dilaksanakan sebagaimana yang telah disyariatkan dan sebagai suatu lambang penghargaan Syariat Islam terhadap wanita.¹⁹

A. Landasan Teoritis Mahar Di Negeri Selangor.

Undang-Undang tentang pemberian mahar kepada istri juga ditulis dalam Enakmen²⁰ Kerajaan Negeri Selangor peruntukan seksyen 21 (1) dan (2) dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam 1984 (Akta 303) berbunyi seperti berikut:

1. Maskawin hendaklah biasanya dibayar oleh pihak lelaki atau wakilnya kepada pihak perempuan atau wakilnya di hadapan orang yang

¹⁹ Abdul Rahman I. Doi, *Shari'ah The Islamic Law/Perkahwinan dalam Syariat Islam, op. cit*, hlm 76.

²⁰ Enakmen adalah Pasal UU.

mengakadnikahkan perkawinan itu dan sekurang-kurangnya dua orang saksi lain.

2. Pendaftar hendaklah, mengenai tiap-tiap perkawinan yang hendak didaftarkan olehnya, menentu dan merekodkan:
 - a. nilai dan butir-butir lain maskawin
 - b. nilai dan butir-butir lain pemberian
 - c. nilai dan butir-butir lain apa-apa bahagian maskawin atau pemberian atau kedua-duanya yang telah dijanjikan tetapi tidak dijelaskan pada masa akadnikah itu, dan tarikh yang dijanjikan untuk penjelasan
 - d. butir-butir cagaran yang diberi bagi menjelaskan maskawin atau pemberian.²¹

²¹ Lembaga Penyelidikan Undang-undang, *Akta Undang-undang Negeri Selangor*, (Petaling Jaya: Laser Press Sdn Bhd, 2008), Tanpa Cetakan, Hal 21.

BAB IV
PENETAPAN HARGA MAHAR (MAS KAWIN) OLEH PEMERINTAH
KERAJAAN NEGERI SELANGOR, MALAYSIA, DITINJAU MENURUT
HUKUM ISLAM

A. Latar Belakang Sejarah Penetapan Harga Mahar Di Selangor

1. Sejarah penetapan maskawin mengikut sejarah bagian Undang-undang Keluarga Jabatan Agama Islam Selangor yang mana Sultan Selangor ketika itu Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah menghendaki adanya satu ta'rif khas bagi maskawin sebagai garis panduan bagi masyarakat umum guna untuk merujuk segala hal yang berkaitan maskawin karena pengetahuan masyarakat umum ketika itu rata-ratanya masih lagi tidak celik tentang hukum hakam syariat Islam dan secara umumnya melalui Jabatan Agama Islam Selangor JAIS telah mengadakan rapat-rapat khusus tentang hal ini bersama pihak yang terkait yaitu Bagian/Department Majlis Fatwa Negeri Selangor dan Mahkamah Syariah dan satu kata putus telah dicapai yaitu bahwa maskawin RM 80.00 bagi yang masih gadis dan janda sebanyak RM 40.00 mulai dilaksanakan pada 1968.¹ Sedangkan pembukuan dan pemberlakuan (Akta/Enakmen) secara menyeluruh terhadap Undang-undang harga maskawin di Negeri Selangor ini di buat pada tahun 1984 tetapi masih bersifat tidak mengikat pada harga yang telah ditetapkan.

¹ Mohd Shahizan Bin Ahmad, Penolong Pengarah Kekeluargaan/Kemasyarakatan , *Naskah Kertas Cadangan/Proposal untuk Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor*, op.cit, hlm 1-2.

Pengkajian ulang atau sekaligus penetapan kadar baru ini dimulai prosesnya dari tahun 2009 dan tepatnya 6 bulan sebelum pelaksanaan seperti berikut:

- a. Seminar perbandingan tentang harga maskawin di seluruh Malaysia.
- b. Mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor.
- c. Mendapatkan persetujuan dari Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor
- d. Pernyataan penetapan harga maskawin oleh Penasihat Undang-undang Kerajaan Negeri Selangor.

Kemudian Jabatan Agama Islam menyebarkan fakta-fakta diatas kepada masyarakat melalui:

- a. Khutbah Jumaat.
- b. Ceramah-ceramah Agama.
- c. Acara-acara anjuran Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS).²

2. Faktor-faktor Penetapan Harga Oleh Pemerintah Kerajaan Negeri Selangor

Adapun yang menjadi faktor penyebab tentang penetapan harga maskawin ini ialah:

- a. Bagian/Department Undang-Undang Keluarga Islam Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) menganalisis hadis ini dengan kenyataan dilapangan hari ini:

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

: ” أَكْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا “.

² Jamilah Binti Muhamad Jamil, Pegawai Penolong Pengarah Bagian Undang-Undang, Jabatan Agama Islam Negeri Selangor (JAIS), Proses pemberlakuan Undang Undang Penetapan Harga mahar, *wawancara*, Shah Alam, Tanggal 23 Agustus 2010.

وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي رواه أحمد والحاكم

Artinya: “Dari Qasim Bin Muhammad, dari Aishah R.A sesungguhnya Nabi Muhammad S.A.W bersabda: Kebanyakan wanita yang berkat perkawinannya ialah yang mudah dan (rendah) tentang perbelanjaan (mahar)” (Riwayat Ahmad dan al-Hakim, dan Muslim menshahihkan dan Dhahabi sepakat dengan dia)³

dengan mengatakan bahwa hadis ini tidak memenuhi maksud syariah untuk masyarakat yang hidup pada zaman modern hari ini. Ini berlaku karena lelaki masih terbeban dengan walimah/hantaran yang kebiasaannya tinggi berdasarkan latar belakang keluarga serta status pendidikan dan kerjaya calon wanita tersebut sehingga menjadi buah bicara masyarakat setempat terkait persoalan walimah dan bukannya maskawin.

- b. Pelaksanaan janda mendapat separuh dari nilai maskawin terdahulu seperti yang diputuskan menurut Bagian/Department Undang-Undang Keluarga Islam Jabatan Agama Islam JAIS tahun 1968 adalah tidak wajar diberlakukan karena status janda adalah semata-mata suatu faktor yang tidak terlintas oleh wanita tersebut akan terjadinya perceraian sama ada cerai hidup maupun mati. Satu pemikiran buruk masyarakat hari ini juga yaitu janda@second/seken hand dari satu negeri ke negeri yang lain dibuat satu perbandingan mana yang lebih mahal atau murah. Ini jelas bertentangan dengan tujuan dasar pemberian mahar sebagaimana yang telah disyariatkan Islam dan juga menjejaskan martabat dan maruah wanita baik gadis mau pun janda.

³ *al-Lu'lu' wal Marjan, Himpunan Hadis Shahih Yang Disepakati Oleh Bukhari dan Muslim, op. cit, hlm 324.*

- c. Aturan yang sedia ada telah hampir empat puluh tahun tidak ditinjau ulang dan perlunya ada perubahan.
- d. Aturan yang sedia ada yaitu harga mahar untuk anak gadis RM 80.00 dan janda RM 40.00 yang telah berjalan hampir empat puluh tahun tidak memenuhi maksud sesuai perubahan masa seperti yang telah dirancang baik dari segi pelaksanaan oleh masyarakat ataupun pemberlakuan undang-undang oleh bagian/departmen Undang-Undang Keluarga Islam JAIS sendiri.
- e. Penetapan ini juga dilaksanakan bagi mengelakkan maksiat yang berleluasa di antara laki-laki dan wanita karena disebabkan faktor tingginya mahar juga sedikit sebanyak memberikan dampak pada kenaikan biaya sebuah perkawinan dan membuka ruang untuk terjadinya maksiat antara laki-laki dan wanita apabila mereka tidak mampu melaksanakan perkawinan yang memakan belanja yang besar. Perkara ini terjadi pada golongan masyarakat khususnya laki-laki yang berpendapatan rendah.
- f. Penetapan harga baru ini juga dikarenakan untuk mengawal masyarakat khususnya kaum ibu-bapa dan keluarga yang mewakili calon pengantin wanita yang cenderung meletakkan harga mahar yang tidak bersempadan dan berdasar.⁴

B. Respon Masyarakat Terhadap Penetapan Harga Mahar Oleh Jabatan Agama Islam Selangor

⁴ Mohd Shahizan Bin Ahmad, Penolong Pengarah Kekeluargaan/Kemasyarakatan, *Naskah Kertas Cadangan/Proposal untuk Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor*, *op. cit*, hlm 3- 9.

Di bawah berikut penulis melampirkan jawaban responden mengenai Penetapan Harga Mahar Oleh Jabatan Agama Islam Negeri Selangor (JAIS).

Tabel 1
Pengetahuan Responden Tentang Mahar (Maskawin) Menurut Agama (Syariat Islam)

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prentasi
1	Mengetahui	83	100%
2	Kurang Mengetahui	-	-
3	Tidak Mengetahui	-	-
3	Jumlah	83	100%

Dari tabel 1 yang penulis ambil berdasarkan sampel jawaban dari sebaran angket keseluruhan responden masyarakat mengetahui kefahaman terhadap mahar dalam perkawinan.

Tabel 2
Pengetahuan Responden Tentang Pembagian Maskawin Yaitu Mitsil Dan Musamma

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prentasi
1	Tidak mengetahui	61	76%
2	Mengetahui	22	24%
3	Jumlah	83	100%

Bedasarkan tabel 2 di atas hanya 24 dari 100% responden mewakili 22 orang yang mengetahui bagian-bagian mahar yaitu *mitsil* dan *musamma* dan selebihnya tidak mengetahui sama sekali bagian-bagian tersebut.

Tabel 3

**Maskawin Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Kerajaan Negeri Selangor
Serta Kesesuaian Ekonomi Masyarakat**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prentasi
1	Mampu	83	100%
2	Tidak mampu	-	0%
3	Jumlah	83	100%

Bedasarkan tabel 3 di atas keseluruhan responden masih mampu memberi maskawin pada jumlah yang diputuskan karena pokok utama permasalahannya bukan disebabkan ekonomi. Responden yang bernama **Ramdan Abu Hassan** memberikan tanggapan bahwa masyarakat bukan menilai penetapan ini pada satu posisi saja, di posisi lain telah banyak harga barang keperluan seharian naik sejak Pemerintah mengumumkan kenaikan harga minyak baru-baru ini dan kalau mas kawin juga dinaikkan, ia pasti akan membebankan golongan laki-laki berpendapatan rendah yang merancang untuk berkawin.

Oleh itu jika tinjauan ulang yang dibuat pada harga maskawin, Pemerintah juga perlu mengkaji kembali sumber pendapatan golongan pekerja laki-laki di

negeri ini. Responden **Mohd. Faisal Mahamud**⁵ berkata “kenaikan kadar mas kawin akan membebankan golongan laki-laki, tambahan pula mereka kini sukar untuk mendapatkan pekerjaan”. Angket pada tabel 3 di atas bersifat tertutup dan 2 orang responden sahaja yang memberikan tanggapan.

Tabel 4
Maskawin, Antara Hak Pilihan Pemberian (Suami) Terhadap Istri Dan Juga Harga Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah (Khusus Responden Laki-laki)

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prentasi
1	Pilihan sendiri	48	78%
2	Jumlah Mengikut Jabatan Agama Islam	13	22%
3	Jumlah	61	100%

Bedasarkan Tabel 4 pada alternatif jawaban nomor 1 menunjukkan responden lebih mendominasi untuk membuat pilihan sendiri terhadap pemberian mahar kepada istri masing-masing yang mana pilihan sendiri tersebut merangkumi faktor-faktor respon jawaban seperti berikut:

- a. Maskawin adalah hak isteri dan boleh dikompromikan antara kedua belah pihak.
- b. Maskawin adalah lebih kepada sifat privasi.

⁵ Ramdan Abu Hassan, Mohd. Faisal Mahamud, responden, *wawancara*, Shah Alam, pada tanggal 21 Juli 2010.

- c. Apabila Jabatan Agama Islam setempat menentukan sesuatu jumlah maskawin, tidak seluruh masyarakat menyetujuinya karena sumber penghasilan masing-masing berbeda.
- d. Mengikut kata putus pihak keluarga wanita bersesuaian dengan kemampuan responden.
- e. Pilihan sendiri ini merangkumi pemberian mahar yang bersifat *mitsil* maupun *musamma*. Apabila Pemerintah melalui Jabatan Agama Islam menetapkan suatu jumlah pemberian harga mahar yang tidak mewakili secara keseluruhan persetujuan dari masyarakat ianya secara tidak langsung akan menghilangkan tradisi Syariat Islam di dalam pemberian mahar *mitsil* atau *musamma* karena tidak ramai masyarakat yang tahu akan hal yang demikian.

Untuk alternatif jawaban yang ke 2, responden yang mengikut harga yang telah ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam karena faktor berikut:

- a. Karena jumlah minimal yang ditetapkan sama seperti yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- b. Responden menyetujui karena tidak mahu berlaku ketidakadilan pada sebelah pihak.
- c. Mempermudahkan urusan.
- d. Penetapan harga yang dibuat bersesuaian dengan keadaan semasa masyarakat.

Angket pada tabel 4 di atas bersifat tertutup dan seramai 10 orang responden yang memberikan tanggapan.

Tabel 5
Maskawin Yang Menjadi Pilihan Wanita Masa Kini
(Khusus Responden Wanita)

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prentasi
1	Uang tunai Rm 300.00 – Rm 600.00	-	-
2	Uang tunai Rm 700.00- Rm 1000.00	5	19%
3	Barang kemas (perhiasan)	13	50%
4	Mashaf al- Quran	3	11%
5	Barang lainnya	5	19%
6	Jumlah	26	100%

Tabel 5 di atas adalah maskawin yang menjadi pilihan setiap wanita pada masa kini yang antara respon lainnya seperti menginginkan mobil, rumah mewah dan perhiasan yang nampak gah disetiap mata yang melihatnya. Sungguh pun begitu tabel di atas adalah gambaran anlisis penulis dilapangan terhadap pasangan yang ingin bernikah dan tidaklah menjadi faktor yang mustahil untuk berlaku karena telah banyak kasus yang berlaku di mana hanya gara-gara bernikah pihak laki-laki terutamanya sanggup melaksanakan pernikahan meskipun dengan berhutang dengan institusi keuangan.

Tetapi bukan itu persoalan pokoknya melainkan penulis ingin mencari kesesuaian antara maskawin yang menjadi pilihan wanita masa kini dan juga

kadar maskawin setempat yang berlaku. Dan ternyata jumlah yang akan dikeluarkan oleh pihak laki-laki yang ditetapkan oleh Pemerintah pada tahap minimal tersangat jauh lebih rendah untuk diukur berbanding permintaan wanita yang jauh lebih tinggi yang mana dari satu sudut Pemerintah perlu membatasi satu jumlah maskawin pada tahap maksimal dan bukannya lagi minimal dalam jumlah yang berbeda mengikut latar belakang pasangan yang akan bernikah.

Tetapi hal ini sangat tidak mungkin untuk diberlakukan melainkan satu solusi yaitu konsultasi perkawinan. Angket tabel 5 di atas bersifat tertutup dan tidak ada responden yang bersedia memberikan tanggapan.

Tabel 6

**Tinggi Rendahnya Mahar Wanita Pada Masa Kini Dianggap Boleh
Meninggikan Atau Merendahkan Status / Martabat Wanita (Khusus
Responden Kaum Ibu Bapa Dan Juga Wanita)**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prentasi
1	Ya	27	65%
2	Tidak	15	35%
1	Jumlah	42	100%

Kesimpulan yang bisa penulis ambil dari tabel 6 di atas pada alternatif jawaban nomor 1 menunjukkan responden wanita yang tidak memahami arti pemberian mahar ibarat martabat dan harga diri mereka hanya bisa diukur dengan

uang. Bahkan responden yang dikenali sebagai Bapak **Ikmal**⁶ yang juga mempunyai seorang anak laki-laki yang akan bernikah memberikan tanggapan bahwa masyarakat hari ini menyangka bahawa keutamaan dalam meletakkan harga yang tinggi untuk kos maskawin adalah perkara utama perlu difikirkan.

Mereka khususnya orang tua seolah-olah melihat maskawin merupakan harga mati bagi seorang perempuan yang perlu diletakkan pada harga setinggi yang mungkin. Ada sesetengah waris seakan merasa hilang maruah bila anaknya mempunyai nilai maskawin yang rendah.

Sementara alternatif jawaban nomor 2 yang menunjukkan tidak karena maskawin tidak hanya terbatas pada pemberian uang melainkan iyanya bisa digantikan dengan harta atau barang yang lain seperti al-Quran, seperangkat alat solat dan barang-barang yang boleh dijadikan manfaat dalam pelbagai perkara yang membuatkan pemberian itu lebih berharga dari pemberian uang semata-mata. Demikian tanggapan seorang responden yang dikenali sebagai Puan / Ibu **Suraya**. Angket tabel 6 di atas adalah bersifat tertutup dan 2 orang responden sahaja yang memberikan tanggapan.

⁶ Bapak Ikmal, Ibu Suraya, responden, *wawancara*, Gombak, pada tanggal 6 April 2011.

Tabel 7

**Mekanisme Pemberian Maskawin Yang Akan Diberikan Calon Suami
Kepada Calon Istri Masing-Masing (Khusus Responden Laki-laki)**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prentasi
1	Tunai	61	100%
2	Hutang	-	-
4	Jumlah	61	101%

Pada tabel 7 ini iyalah mekanisme pemberian maskawin responden terhadap istri mereka keseluruhannya adalah tunai dan tiada pemberian mahar secara hutang.

Tabel 8

**Kewajaran Pemerintah Dalam Menetapkan Harga Mahar Kepada
Masyarakat**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prentasi
1	Wajar	49	64%
2	Tidak wajar	34	36%
3	Jumlah	83	100%

Tabel 8 adalah respon masyarakat terhadap kewajaran Pemerintah yaitu Jabatan Agama Islam Selangor dalam menetapkan harga mahar terhadap masyarakat. Merujuk pada alternatif jawaban nomor 1 tabel di atas 9 responden menyatakan wajar karena perlu seiring dengan keadaan semasa masyarakat dan

keputusan yang di ambil oleh Pemerintah dalam menetapkan jumlah baru ini sebagai satu langkah menghargai dan menyanjungi dan menaikkan martabat wanita. Seorang responden bernama **Amran Shamsudin** pula berkata, dia bersetuju dengan cadangan kerajaan Selangor untuk menetapkan kadar maskawin pada jumlah tersebut karena ia akan menjadi satu *honour* kepada golongan wanita bagi mengimbangi kos sara hidup sekarang yang tinggi. “Pihak laki-laki perlu berlaku adil kepada bakal isteri mereka dan maskawin pula boleh dianggap sebagai salah satu hadiah yang mampu menggembirakan pihak isteri,”.

Hukum Syarak tidak menghadkan kadar minimum atau maksimum maskahwin. Islam mengiktiraf bahawa setiap orang berbeza kaya dan miskinnya, lapang dan sempit rezekinya. Islam juga mengiktiraf bahawa setiap masyarakat juga mempunyai adat dan tradisinya yang tersendiri. Kerana itu Islam menyerahkan masalah jumlah maskawin itu berdasarkan kemampuan dan tradisi masing-masing. Jadi untuk menentukan banyak atau sedikit maskawin terpulang kepada dua pihak di atas persetujuannya dan berdasarkan taraf atau darjat pengantin tersebut. Namun demi menjaga *masalah* ummah umat Islam hari ini, supaya jumlah maskawin tidak diletakkan sewenang-wenangnya atau direndahkan ke tahap yang boleh merendahkan status wanita, adalah wajar bagi pemerintah menetapkan jumlah maskawin jelas responden yang dikenali sebagai **Encik Din**. Sementara 27 responden yang memilih alternatif jawaban ke 2 ini karena satu faktor pentingnya iyalah pemerintah telah menafikan hak para suami

untuk menetapkan sendiri jumlah mahar terhadap istri masing-masing. Responden **Ahmad Man**⁷ menjelaskan bahwa Pemerintah harus menilai kembali putusan yang telah diaplikasikan kepada masyarakat karena tampak Jabatan Agama Islam Selangor seperti buntu dalam cuba membawa sesuatu yang benar-benar bermanfaat untuk umat Islam di Negeri Selangor 80 ke 300 bukan begitu *signifikan* dan itu bukan nilai wanita yang dikawini.

Wanita yang ingin dinikahi nilainya bukan nilainya pada maskawin. Jelas responden yang membaca *press statement* Ketua Pengarah JAIS yang seperti tidak memahami akan hal ini. Angket pada tabel 8 di atas bersifat tertutup dan hanya 3 responden sahaja yang memberikan tanggapan.

Tabel 9

Bertambahnya Belanja Kos Perkawinan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prentasi
1	Ya	83	100%
2	Tidak	-	-
3	Jumlah	83	100%

Tabel 9 di atas menunjukkan kesemua responden menyatakan bahwa perbelanjaan perkawinan secara tidak langsungnya akan bertambah karena tinggi rendahnya maskawin sangat terkait rapat dengan tinggi rendahnya perbelanjaan

⁷ Ahmad Man, Encik Din, Amran Shamsudin, responden, *wawancara*, Shah Alam, pada tanggal 10 Juli, 2010.

khusus pada hantaran. Apatah lagi pada masa kini khususnya kaum keluarga pihak wanita pasti inginkan majlis pernikahan yang tampak gilang gemilang. Angket tabel 9 di atas bersifat tertutup dan tidak ada responden yang bersedia memberikan tanggapan.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Mahar (Maskawin) Oleh Pemerintah Kerajaan Negeri Selangor, Malaysia

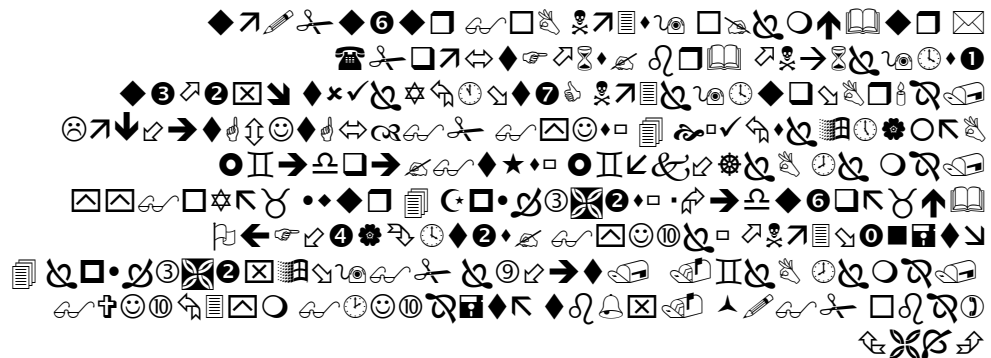
1. Penetapan Harga Mahar (Maskawin) Oleh Pemerintah Kerajaan Negeri Selangor, Malaysia, Ditinjau Menurut Hukum Islam dari satu sisi penulis melihat penetapan ini masih belum lagi dilaksanakan secara menyeluruh kepada setiap masyarakat di Negeri Selangor karena penetapan ini di putuskan hanya pada jumlah minimal bermakna jumlah maskawin bisa mencapai pada tahap yang semaksimal mungkin bagi masyarakat khususnya ibu bapa yang tidak memahami maksud dan tujuan pemberian mahar dalam Syariat Islam. Sampel dari populasi hasil tinjauan dilapangan juga mendapati hanya 13 dari 61 orang (laki-laki) yang mendaftarkan perkawinan mereka di Jabatan Agama Islam Selangor yang mengikuti jumlah harga mahar yang telah ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam Selangor.

Lain-lain perkara seperti maskawin tidak hanya terbatas pada pemberian uang tunai ianya juga adalah hak mutlak para isteri yang boleh dikompromikan melalui hasil perbincangan antara pihak suami dan juga isteri.

Penetapan ini juga telah membuatkan pertembungan pendapat antara masyarakat dan juga Jabatan Agama Islam yang mana masyarakat menganggap Jabatan Agama Islam telah menafikan hak mereka sebagai pihak yang berautoritas dalam menentukan mahar dalam sebuah perkawinan.

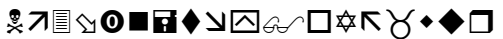

Setelah dianalisis menggunakan Hukum Islam, maka terdapat faktor faktor yang masih tidak memenuhi maksud dan kehendak Syariat Islam dalam penetapan harga maskawin yaitu:

a. Penulis ingin merujuk kembali Firman Allah SWT:



Artinya: “Kemudian mana-mana perempuan yang kamu nikmati percampuran dengannya (setelah ia menjadi isteri kamu), maka berikanlah kepada mereka maskawinnya (dengan sempurna), sebagai suatu ketetapan (yang diwajibkan oleh Allah) dan tiadalah kamu berdosa mengenai sesuatu persetujuan yang telah dicapai bersama oleh kamu sesudah ditetapkan maskawin itu (tentang cara dan kadar pembayarannya) Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana” QS an-Nisa [24]⁸

⁸ Shahih Tafsir Ibnu Katsir, op. cit, hlm 470.

Merujuk kepada kalimat  yaitu *jama'* *dhomiir*⁹ (kata ganti) mengartikan makna kamu itu dikembalikan hanya kepada suami sahaja karena suamilah sebagai pemberi mahar kepada isteri jika dirujuk di kitab-kitab tafsir pun ia tetap diterjemahkan hanya kepada suami istri meskipun  bisa dipakai untuk lebih dari dua orang atau lebih.¹⁰ Di dalam kitab *Matla' al-Badrain* menjelaskan bahwa Hakim atau Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai kategori wali kepada rakyatnya boleh menetapkan sesuatu jumlah mahar untuk pasangan laki-laki dan wanita yang ingin menikah apabila terjadi perkara-perkara sedemikian:

1. Apabila istri meminta menetapkan jumlah mahar tetapi suami menolak untuk hal itu.
2. Suami istri bertelingkah menentukan kadar mahar.
3. Ataupun apabila terdapat masyarakat khususnya ibu-bapa dari pihak calon isteri yang menetapkan jumlah yang semaksimal mungkin dan akan membebankan calon suami seperti data pada

⁹ M, Sholihuddin, *Pengantar Memahami al-Jurumiyyah*, (Jawa Timur: Darul Hikmah, 2007), Cet. Ke 1, hlm 92.

¹⁰ Department Agama RI, *al-Quranulkarim/al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005), Cet. Ke I, hlm 82.

tabel 7 di atas yang mana martabat wanita bisa di ukur dengan tinggi dan rendah mahar.¹¹

Dengan hal yang demikian maka disini baru adanya keperluan Hakim atau Pemerintah untuk menentukan mahar untuk tiga keadaan di atas.

- b. Begitu juga dengan wanita yang berstatus janda, sekali lagi penulis ingin merujuk hadis Rasulullah S.A.W:

(الأيم احق بنفسها من ولها :

Artinya: “*Dari Ibnu Abbas Rasulullah S.A.W berkata wanita janda itu lebih berhak tentang dirinya daripada walinya*” (Riwayat Muslim)¹²

Walaupun penulis tidak berhasil menemukan responden di kalangan wanita berstatus janda tetapi putusan baru yang telah ditetapkan oleh Pemerintah khususnya JAIS seperti yang terlampir di bawah ini:

SHAH ALAM: Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) mengumumkan bermula 1 Januari 2010, maskawin untuk wanita di Negeri Selangor ditetapkan kepada RM300 pada kadar minimum setelah diperkenan oleh Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah.

Pengarah JAIS, Datuk Mohammed Kusrin Munawi berkata, perkara ini merupakan salah satu usaha menaikkan martabat wanita pada masa kini.

¹¹ Muhammad Bin Ismail, *Terjemahan Matla' al-Badrain*, penerjemah Haji Hassan Bin Ahmad, (Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 1992), Cet. Ke II, hlm 433.

¹² *Mukhtashar Shahih Muslim/Ringkasan Shahih Muslim*, op. cit, hlm 337.

Nilai mas kahwin di Selangor pada masa ini ialah RM80 bagi perempuan yang belum berkahwin dan RM40 bagi yang berstatus janda.

“Mulai 1 Januari 2010, JAIS menetapkan kadar minimum mas kahwin sebanyak RM300 bagi wanita yang belum berkahwin mahupun janda dan tidak ada lagi istilah wang hantaran kerana ia sudah termasuk dalam perkiraan mas kahwin”.¹³

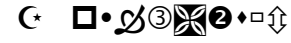
Penetapan harga mahar ini juga melalui petikan di atas masih lagi tidak memenuhi maksud syariat seperti yang terkandung didalam hadits diatas. Setidaknya terdapat tiga faktor yang bisa penulis analisis disini yaitu:

1. Pemerintah Jabatan Agama Islam telah menafikan hak wanita yang bersatus janda untuk memilih mahar untuk dirinya sedangkan hadits diatas jelas memberikan autoritas yang penuh kepada wanita berstatus janda untuk menentukan mahar mereka baik dalam bentuk *mitsil* maupun *musamma*.
2. Maskawinnya bertambah sehingga tujuh kali ganda dari sebelumnya.
3. Pemerintah hanya mengaplikasikan pemberian mahar hanya terbatas pada uang ringgit sedangkan pada tabel 6 pemberian mahar kepada istri berbentuk naskah al-Quran, seperangkat alat solat dan harta yang lebih bernilai dari uang ringgit pada hari ini masih berlaku.

Saidina Umar R.A semasa zaman kekhalifahan beliau pernah menetapkan kadar mahar kepada wanita. Apabila Saidina Umar mahu

¹³ Nurul Ain. Mohd Hussain, *Kadar Mas Kahwin: Masyarakat Perlu Bezakan Antara 'Adat Dan Ibadat*, (Kuala Lumpur; Utusan Malaysia, 2010), Tanpa Cetakan, hlm 13.

menggunakan kuasanya sebagai khalifah untuk membatasi mahar bagi memudahkan urusan perkahwinan, beliau ditegur oleh seorang perempuan rakyat jelata yang mengatakan: "*Mahar itu hak perempuan*". Lantas beliau akur menerima teguran tersebut dan menarik kembali putusan tersebut.¹⁴

- c. Terakhir tentang mahar *mitsil* dan *musamma*, dengan mengaplikasikan penetapan harga maskawin masyarakat di Selangor ini, Pemerintah khususnya Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) dari satu sisinya telah menghilangkan praktik terhadap pemberian mahar samada *mitsil* maupun *musamma* dikarenakan pada tabel 5 penetapan harga maskawin masih lagi tidak mewakili persetujuan keseluruhan masyarakat sedangkan petikan dari ayat  yang berarti: “*padahal kamu (suami istri) sudah menetapkan kadar maskawin (telah bersepakat)*”¹⁵

telah mengakui hal yang demikian.

Dengan mewakili 76% responden yang tidak mengetahui baik mahar *musamma* maupun *mitsil* penulis percaya masih ramai lagi masyarakat yang belum atau apatah lagi yang sudah menikah yang tidak mengerti bagian-bagian mahar yaitu *musamma* dan *mitsil*. Jika penetapan harga ini berhasil diaplikasikan sepenuhnya kepada masyarakat di Negeri Selangor, dampak dari pada putusan ini mungkin akan melahirkan

¹⁴ *Fikih Keluarga*, op, cit, hlm 73.

¹⁵ Sheik Abdullah Basmeih, *Tafsir Pimpinan ar-Rahman Kepada Pengertian al-Quran*, (Kuala Lumpur: Darul Fikir, 1980), Cet. Ke X1, hlm 93.

masyarakat khususnya muda mudi dan pasangan yang akan melaksanakan perkawinan yang kurang berpengetahuan tentang Hukum Islam khususnya ilmu tentang perkawinan.

2. Sanksi / sebab akibat bagi masyarakat yang tidak mengikuti jumlah maskawin sesuai peraturan yang ditetapkan

Di dalam melaksanakan putusan ini, bagi masyarakat terutama bagi laki-laki sebagai pemberi mahar pada wanita yang melanggar atau tidak mengikuti sesuai yang telah diputuskan tidaklah dikenakan atau mempunyai apa-apa sanksi yang ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam Selangor kerana iya bukanlah satu bentuk pelanggaran pidana melainkan aturan ini dibuat pada dasarnya adalah untuk menjamin kedudukan wanita dengan jumlah pemberian maskawin yang diberikan sesuai mengikut perubahan masa di samping aturan ini dibuat untuk mengawal jumlah harga maskawin bagi mengelakkan beban yang akan ditanggung pihak laki-laki apabila pihak keluarga wanita relatif meminta harga yang tinggi.

Hanya saja bagi pasangan yang tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan, dalam jangka waktu yang panjang akan mempunyai akibat serta dampak yang buruk dan akan menjadi ikutan kepada masyarakat yang tidak mempunyai pedoman dalam menentukan pemberian maskawin sesuai dengan status wanita dan juga keadaan semasa (dalam hal ini kebiasaanya akan dikembalikan oleh ibu bapa pihak wanita) akan menentukan harga

pembeian mahar yang relatif tinggi diminta oleh pihak wanita sehingga mengatasi maskawin puteri Sultan dan juga kerabat diraja yang pastinya akan memberatkan pihak laki-laki dalam menunaikan permintaan pihak wanita.¹⁶

Secara kemaslahatannya pula, putusan ini masih lagi tidak mewakili kepentingan sebagian masyarakat Negeri Selangor karena dalam Syariat Islam sendiri telah menggariskan beberapa hal tentang tata cara pemberian mahar selain ditentukan oleh hakim seperti:

1. Terdapatnya mahar baik pemberian secara *mitsil* maupun *musamma*.
2. Penentuan mahar wanita yang berstatus janda adalah ditentukan oleh dirinya sendiri baik atas kesepakatan bersama atau mengikut pemberian yang iya minta.
3. Pemberian mahar kepada istri tidak semestinya dengan uang ringgit.

¹⁶ Mohd Shahizan Bin Ahmad, Penolong Pengarah Kekeluargaan/Kemasyarakatan *Naskah Kertas Cadangan/Proposal untuk Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor*, *op. cit*, hlm 2.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian yang telah penulis bahas didalam bab iv, maka maka dapat penulis tarik kesimpulan hasil penelitian ini seperti yang berikut:

1. Penetapan Harga Mahar (Maskawin) Oleh Pemerintah Kerajaan Negeri Selangor yang berwenang di bawah Jabatan Agama Islam Selangor adalah hasil dari tinjau ulang putusan terdahulu yang mana Jabatan Agama Islam merasakan aturan tersebut tidak lagi sesuai untuk diberlakukan pada masa kini di samping tujuannya adalah untuk menjamin martabat wanita di Negeri Selangor dengan kadar mahar yang sesuai mengikut perubahan masa dan juga untuk mengawal kadar pemberian mahar yang mana penetapan ini disasarkan kepada keluarga pihak wanita yang kebiasannya meletakkan kadar jumlahnya relatif tinggi dan bisa menjadi kendala kepada pihak laki-laki dalam melaksanakan pernikahan.
2. Sungguh pun begitu dalam melaksanakan penetapan mahar ini terjadinya pertindihan dan pertembungan pendapat antara masyarakat dan juga Jabatan Agama Islam Selangor dalam mengaplikasikan putusan ini karena penetapan harga maskawin oleh Jabatan Agama Islam Selangor masih lagi pada tahap

jumlah minimal dan masih terbuka ruangnya untuk dinaikkan kepada tahap yang lebih tinggi selain juga seperti menghilangkan hak dan autoritas kepada pihak yang bersangkutan baik dari pihak calon suami maupun pihak keluarga wanita atau atas kesepakatan bersama dalam menentukan kadar pemberian mahar. Penetapan harga mahar ini juga masih lagi tidak sepenuhnya dapat diaplikasikan kepada masyarakat karena masih ada bakal calon suami istri yang membuat pilihan sendiri dalam menetapkan kadar pemberian mahar.

3. Tinjauan Hukum Islam mendapati penetapan harga mahar di Negeri Selangor dari satu sisi masih lagi ada hal yang tidak sejalan dengan syariat yang dilandaskan seperti penetapan harga mahar ini juga turut diberlakukan kepada wanita yang berstatus janda. Seperti yang telah penulis ungkapkan pada bab satu bahawasanya wanita yang berstatus janda lebih berhak ke atas dirinya berbanding walinya. Ini berdasarkan dalil dari Hadis yang artinya: *“Dari Ibnu Abbas Rasulullah S.A.W berkata wanita janda itu lebih berhak tentang dirinya daripada walinya” (Riwayat Muslim)*¹ dan juga pendapat dari Yunus Ibnu ‘Abdul al-A`la (ulama’ yang ahli dalam ilmu waris) mengatakan seandainya dari pihak janda tidak mempunyai wali *ashib* (ahli waris) yaitu sama sekali tak mempunyai wali atau wali yang bukan wali *ashib*, maka tidak ada hak bagi seorang pun diantara mereka untuk menghalang-halangi aqad nikahnya, baik ia kawin dengan pria

¹ Mukhtashar Shahih Muslim/Ringkasan Shahih Muslim, *op. cit*, hlm 337.

sederajat atau tidak, dengan mahar *mitsil* atau kurang. Sebab dalam keadaan demikian seluruh urusan dirinya menjadi tanggung jawabnya sendiri sepenuhnya².

B. Saran

Apa yang menjadi dasar untuk penulis melakukan penelitian ini ialah apabila mengobservasi keadaan rakyat di Negeri Selangor yang mempermasalahkan tentang putusan harga mahar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Negeri Selangor khususnya Jabatan Agama Islam Selangor. Maka dengan hasil penelitian yang telah dibahas diatas penulis ingin memberikan masukan berbentuk saran-saran kepada masyarakat, Jabatan Agama Islam Selangor dan juga Pemerintah Kerajaan Negeri Selangor seperti berikut:

1. Kepada calon pengantin beserta mempelai kedua belah pihak harus menetapkan suatu kadar harga yang bersesuaian dengan garis panduan yang telah ditetapkan oleh Syariat Islam. Apabila tidak ditemukan kesepakatan antara keduanya, maka harus merujuk pada badan yang berwenang yaitu Jabatan Agama Islam.
2. Secara umumnya kepada seluruh masyarakat terutama kepada kaum wanita, dan juga ibu bapa jangan dinilai berapa maskawin yang bakal diterima atau

² Janda, *op. cit*, hal 142.

ditetapkan atau disepakati karena harga diri serta martabat wanita tidak akan berdampak dengan berapa pun jumlah mahar yang diterima karena mahar bukan sebagai alat untuk mengukur martabat wanita melainkan iyanya adalah ketentuan yang telah disyariatkan kepada laki-laki yang bergelar suami dan apa yang perlu di nilai ialah tanggungjawab suami terutamanya sebagai kepala keluarga dalam menafkahi dan menghidupi keluarga selama berjalannya sebuah perkawinan.

3. Jabatan Agama Islam Selangor selaku badan yang berwenang mengatur hal ehwal agama islam di negeri Selangor seharusnya mengaplikasikan suatu aturan sesuai dengan kondisi setiap individu di dalam masyarakat di negeri tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata, *Fiqh Munakahat*, Jakarta:Prenada Media, 2003, Cet ke VII.
- Abdullah Bin Abdurahman al-Bassam, *Bulughul Maram*, penerjemah Tahrin Suparta, M.Faisal, Adis Aidizar, Jakarta: Pustaka alzam, 2006, Cet. ke III.
- Abdul Rahman I. Doi, *Shari'ah The Islamic Law/Perkahwinan dalam Syariat Islam*, penerjemah Drs, H, Basri Asghari/ H. Wadi Masturi, S.E, Jakarta, 1999, Cet. ke III.
- Ahmad Baei Jaafar, *Dara Atau Janda, Mas Kahwin Minimum Rm300*, Kuala Lumpur:Utusan Harian, 2010, Tanpa cetakan.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010, Cet. ke III.
- Aziz Salim Basyarahil, M. Fauzan Adhim , *Janda*, Jakarta: Gema Insani, 1999, Cet. ke 1.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, Cet. ke I.
- Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, Jakarta Timur: Prenada Media, 2003 Cetakan ke 1.
- Department Agama RI, *al-Quranulkarim/al-Quran Dan Terjemahannya* Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005, Cet. ke I.
- Jaafar bin Ahmad, Mohd. Khialdin bin Hj. Ahmad, *Peranan Majlis-majlis/Jabatan-Jabatan Agama Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam Di Malaysia* Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 1984, Cet. Ke 1.
- Khoo Kay Kim, *Selangor Dulu dan Sekarang*, Kuala Lumpur: Persatuan Muzium Malaysia, 1985, Cet. ke 1.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid/Analisa Fiqih Para Mujtahdi*, penerjemah Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, Cet. ke II.

- Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, penerjemah Imron Rosadi, Amiruddin, Imam Awaluddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, Cet ke V.
- Imam al-Hafidz Ali bin Umar Abu ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daruquthni Jilid 3*, penerjemah Majdi Bin Manshur Jakarta: Pustaka Azzam, 2010, Cet. Ke III.
- Imam Al Hakim, *al Mustadrak*, penerjemah, Ali Murtadho, M. Iqbal Kadir, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010, Cet. Ke V.
- Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran, *al-Mujib al-Quran Dan Terjemahannya Edisi Asmaul Husna Dan Doa*, Bandung: al-Mizan Pubishing House, 2009, Cet. Ke II.
- Lembaga Penyelidikan Undang-undang, *Akta Undang-Undang Negeri Selangor*. Petaling Jaya: Laser Press Sdn Bhd, 2008, Tanpa cetakan.
- M. Nashiruddin al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim/Ringkasan Shahih Muslim*, penerjemah Elly Lathifah Jakarta: Gema Insani, 2008, Cet. Ke 4.
- M. Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Nasai*, penerjemah Abu Zahwa, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010, Cetakan ke IV.
- M, Sholihuddin, *Pengantar Memahami al-Jurumiyyah*, Jawa Timur: Darul Hikmah, 2007, Cet. Ke 1.
- Mohd Idris Abdul Rauf aL-Marbawi, *Kamus Arab-Melayu Idris al-Marbawi*, Kuala Lumpur: Darul Fikir, 1990, Cet. Ke 1.
- Muhamad Fu'ad Abdul Baqi, *al-Lu'lu' wal Marjan, Himpunan Hadis Shahih Yang Disepakati Oleh Bukhari dan Muslim*, Surabaya: Pt Bina Ilmu, 2005, Cet. ke-1.
- Muhammad Ali Qutb, *Mutiara Perkahwinan Menurut Ajaran Islam*, Selangor: Pustaka Haji Abdul Majid Sdn Bhd, 2010, Cet. Ke II.
- Muhammad Bin Ismail al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, penerjemah Muhammad Isnani, Ali Fauzan, Darwis Jakarta: Darus Sunnah, 2008, Cet. Ke V.

- Muhammad Bin Ismail, *Terjemahan Matla' al-Badrain*, penerjemah Haji Hassan Bin Ahmad, Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 1999, Cet. Ke II.
- Muhammad Bin Kamal Khalid as-Suyuthi, *Kumpulan Hadis Yang Di Sepakati Empat Imam*, penerjemah Masruni Sasaky, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, Cet. Ke II.
- Ramayulis Khatib, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Kalam Mulia, 1996, Cet. Ke II.
- Ranjit Singh Malhi, *Kenegaraan Malaysia*, Subang: Federal Publication Sdn Bhd, 1994, Cet. Ke, III.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Penerjemah Abdurahhim dan Masrukhin. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008, Tanpa cetakan.
- Shahizan Bin Ahmad, Penolong Pengarah Kekeluargaan/Kemasyarakatan, *Naskah Kertas Cadangan/Proposal untuk Mesyuarat Jawatankuasa . Fatwa Negeri Selangor* Shah alam, 2009, Tanpa cetakan.
- Suharsimi Arikunto, *Prosuder Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, Cet. Ke XIII.
- Syaikh al-Allamah Muhammad Bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, penerjemah Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi Press, 2010, Cet Ke XII.
- Syaikh Hassan Ayub, *Fikih Keluarga*, penerjemah, M, Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, penerjemah Abu Ahsan Sirojuddin Hsan Basri, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010, Cet. Ke III.
- Sheik Abdullah Basmeih, *Tafsir Pimpinan ar-Rahman Kepada Pengertian al-Quran*, Kuala Lumpur: Darul Fikir, 1980, Cet. Ke X1.
- Type Hijjaz , *Syaamil al-Quran Terjemahan al-Quran Per-Kata*, Jakarta: Sygma, 2007, Cet. Ke I.

Yayasan Penyelenggaraan penterjemahan al-Quran, *al-Quran Dan Terjemahannya*, Semarang: Cv Toha Putra, 1989, Cet. Ke III.